



BAHASA INDONESIA MENJEJAK ABAD KEDUA PULUH SATU

SENDI-SENDI ILMIAH BAGI PEMBINAAN BAHASA

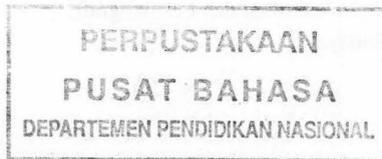
Harimurti Kridalaksana

02

Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia
2010

118 11

BAHASA INDONESIA MENJEJAK ABAD KEDUA PULUH SATU



SENDI-SENDI ILMIAH BAGI PEMBINAAN BAHASA

Harimurti Kridalaksana

Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

2010

SENDI-SENDI ILMIAH BAGI PEMBINAAN BAHASA

Publikasi no 8

@2010 Penerbit Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Penulis Harimurti Kridalaksana

Diterbitkan pertama kali tahun 2010 oleh
Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sendi-sendi Ilmiah bagi Pembinaan Bahasa Indonesia/Harimurti
Kridalaksana—Depok: Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi Fakultas
Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2010
viii + 57 hlm

ISBN 978-979-99145-4-5

Dicetak oleh *Tiga Pena Mandiri*, Jakarta

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
U Klasifikasi 499.210 2 KRI S	No. Induk : 86 Tgl. : 16/2/2011 Tld. : _____

Buku ini disusun untuk memperingati jasa-jasa para pendekar bahasa dalam periode terawal sejarah Bahasa Indonesia:

Ki Hadjar Dewantara
M. Tabrani
M. Yamin
Soemanang
Soedarjo Tjokrosisworo

DAFTAR ISI

Prakata.....	v
Pengantar.....	vi
1. Beberapa persoalan yang dihadapi Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan.....	1
2. Reformasi Ejaan 1972.....	9
3. Sejarah peristilahan dalam Bahasa Indonesia.....	19
4. Kemajuan penyelidikan tata bahasa dan pembinaan bahasa.....	41
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia: fungsinya dalam pengembangan bahasa.....	49

PRAKATA

Penulis menyatakan terima kasih kepada Prof. Dr. Hermina Sutami, Kepala Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia, yang memberi kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan buku ini dalam rangka hari Kelahiran Bahasa Indonesia 2 Mei 2010. Penulis juga tidak melupakan jasa-jasa Ratnawati Rachmat, M. Hum. dan Novika Stri Wrihatni, M. Hum. dalam mengusahakan penyuntingan buku ini sehingga menjadi bentuk buku yang pantas.

PENGANTAR

Sebagaimana pernah disampaikan dalam kesempatan lain, pengembangan Bahasa Indonesia sejak awal ditentukan oleh pemikiran dan saran yang diungkapkan oleh anggota masyarakat yang sangat peduli akan masa depan bangsa Indonesia. Dalam buku kecil saya *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia*, saya berusaha menuturkan bagaimana perjuangan para tokoh kemerdekaan mengungkapkan pikiran mereka mengenai persatuan bangsa dengan memperjuangkan pengakuan bahasa persatuan Bahasa Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara, M. Tabrani, M. Yamin, Soemanang, Soedarjo Tjokrosisworo adalah tokoh-tokoh yang bukan ahli bahasa profesional, tetapi memelopori tegaknya bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Baru pada pertengahan abad ke-20 dan awal abad ke-21 para ahli bahasa dan ahli ilmu pengetahuan profesional tampil menyumbangkan pemikirannya dalam pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia. Dalam periode itu dapat kita bedakan para pendekar bahasa dan para ahli profesional. Para pendekar bahasa bermodalkan kepedulian yang sangat mendalam tentang seluk beluk bahasanya memberikannya sumbangan pemikiran agar dapat berfungsi secara maksimal dalam bidang ejaan, istilah, dan tata bahasa—semuanya dipandang dari sudut kepakaran masing-masing. Tokoh-tokoh yang dapat disebut pendekar bahasa adalah Prof. Johannes, Prof. Liek Wilardjo, Hadyana Pudjaatmaka, Prof. Mien Rivai, M. M. Purbahadiwidjaja, dan banyak sarjana dalam bidang di luar ilmu bahasa yang telah menyumbangkan pikirannya bagi kemajuan bahasa kita. Mereka berlainan dari penulis buku ini yang tidak bisa disebut pendekar bahasa karena memang tugasnya adalah mengembangkan wawasan dan ilmu bahasa berdasarkan pendidikannya. Kawan seprofesinya termasuk Prof. Anton Moeliono, Prof. Badudu, Prof. Takdir Alisjahbana, Prof. Slametmuljana, dan banyak sarjana bidang bahasa dan sastra lain yang pekerjaan sehari-hari adalah mengajar dan meneliti bahasa.

Penulis buku ini sejak awal kariernya sudah menulis mengenai bahasa. Karya pertamanya

ditulis ketika ia masih duduk di SMA kelas II berjudul “Tanda Batja” dan dimuat dalam majalah *Pembinaan Bahasa Indonesia* tahun 1957. Sampai pensiun sebagai pegawai negeri pada tahun 2005 ia masih meneliti dan menulis, beberapa di antara karya itu pernah disiarkan dalam pelbagai kesempatan dan disajikan kembali dalam buku ini (dengan memberinya perspektif sejarah Bahasa Indonesia). Tulisannya tentang ejaan, istilah, dan tata bahasa sudah dikenal banyak orang ketika terbit pada tahun 1970-an karena isinya yang kontroversial. Di sini dimuat lagi tulisannya tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memuat ide terawal (1974) tentang proyek yang kemudian menjadi program (paling) besar Pusat Bahasa. Pemikiran dalam karya-karya yang dimuat lagi dalam buku ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagaimana Bahasa Indonesia terbangun dan terbina oleh ide-ide yang berasal dari para pelaku sejarah bahasa pada periode yang paling mutakhir sebagai penerus para pelopor tahun 20-an.

Hari ulang tahun Bahasa Indonesia
2 Mei 2010

1. BEBERAPA PERSOALAN YANG DIHADAPI BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ILMU PENGETAHUAN

1. Bahasa Indonesia sebagai medium penyampaian dan penyebarluasan ilmu pengetahuan

Pada tahun-tahun yang lampau bahasa nasional kita telah membuktikan kemampuannya sebagai medium untuk menyampaikan dan penyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tanpa kesukaran-kesukaran yang berarti ia telah mampu menjadi bahasa pengajaran mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi; di samping itu mampu juga ia dijadikan alat untuk ekspresi ilmiah dalam karya-karya ilmiah.

Akan tetapi, dengan makin mendalamnya pengajian kita dalam sesuatu ilmu, makin terasa adanya kekurangan-kekurangan dalam bahasa kita karena tiadanya ungkapan-ungkapan untuk menyatakan konsep-konsep yang teliti dan halus-halus. Inilah persoalan yang dihadapi oleh para karyawan ilmiah Indonesia - persoalan yang dihadapi oleh semua pihak, bukan hanya oleh para ahli Bahasa Indonesia, melainkan juga oleh para ahli lain yang bekerja dalam pelbagai cabang ilmu-pengetahuan.

Inipun dengan pengertian, bahwa kita tidak puas dengan keadaan sekarang dan ingin terus membina Bahasa Indonesia menjadi bahasa modern yang dewasa. Halnya lain sekali jika kita sudah puas dengan keadaan Bahasa Indonesia sekarang dan menganggap tidak perlu Bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan,

karena kita *toh* dapat memakai Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Belanda dan lain-lain untuk keperluan itu. Menurut anggapan penulis, sikap yang terakhir ini sangat membahayakan Bahasa Indonesia, karena jika dilaksanakan akan mensterilkan bahasa nasional kita.

2. Persoalan bahasa dalam ekspresi ilmiah

Seorang pekerja ilmiah yang harus melaporkan hasil penyelidikannya dalam sesuatu. Cabang ilmu akan menghadapi beberapa masalah. Masalah yang utama ialah *bagaimana konsep-konsep yang diperoleh dari penyelidikannya itu harus diungkapkan dan bagaimana ungkapan itu harus dirangkai-rangkaian dalam Bahasa Indonesia*. Persoalan ini sebenarnya persoalan yang universal, tidak hanya akan dihadapi oleh orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, tetapi juga oleh orang lain yang sudah maju bahasanya.

Kalau pekerja ilmiah itu sudah biasa mempergunakan bahasa lain dan ingin memindahkan konsep-konsep itu ke dalam Bahasa Indonesia maka persoalan yang dihadapi adalah *persoalan terjemahan*. Karena pada umumnya sarjana-sarjana Indonesia mengenal bahasa-bahasa asing, maka sebagian besar daripada ekspresi ilmiah itu merupakan proses penterjemahan. Akan tetapi, justru di sini letak persoalan bahasa nasional kita sekarang ini. Di samping pekerjaan itu tidak semudah yang disangka orang, kita tidak dapat terus menerus menggantungkan diri dari terjemahan (yang notabene hingga kini sangat sedikit dilaksanakan dalam bidang ilmu pengetahuan). Pada satu ketika kita harus mengungkapkan konsep-konsep ilmiah langsung dalam Bahasa Indonesia. Hal ini akan nyata perlunya apabila kita harus melaporkan penyelidikan kita mengenai masalah-masalah keindonesiaan sendiri. Dan di sini akan nyata betapa terikatnya kita pada bumi di mana kita berpijak. Betapapun internasionalnya sifat ilmu yang kita kaji, pembawaan kita sebagai orang Indonesia tak dapat dihilangkan. Kita saksikan misalnya betapa banyaknya suatu cabang ilmu mempunyai aliran-aliran - aliran-aliran sebagian timbul dari kenasionalan dan bahasa seorang sarjana. Betapa tidak? Bukankah kita harus memilih satu bahasa untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu?

Betapa besar pengaruh bahasa seorang penyelidik akan nyata apabila ia harus membuat abstraksi-abstraksi dari hasil penyelidikannya dan membuat

simbolisasi bagi fakta-fakta yang ditemukannya. Kemampuan suatu bahasa sungguh-sungguh diuji dalam taraf ini.

3. Beberapa persoalan semantik dari ungkapan ilmiah

Pengungkapan ilmiah sebagai proses pertama-tama bersifat semantik. Di bawah ini kami catat beberapa persoalan utama.

generalisasi lawan spesifikasi

Tak ada bahasa yang seratus persen sanggup mengungkapkan generalisasi, dan tak ada yang seratus persen mampu mengungkapkan spesifikasi; biasanya kesanggupan bahasa ada di antara kedua kutub itu. Ullmann (1966:227) misalnya menunjukkan beberapa contoh yang memperlihatkan bahwa Bahasa Jerman lebih “spesifik” daripada Bahasa Prancis, misalnya untuk kata Jerman *stehen, sitzen, liegen, hängen* hanya ada satu kata Prancis *être*: makna yang digambarkan kata-kata Jerman itu dalam Bahasa Prancis baru nyata dalam konteks.

Dalam lapangan-lapangan tertentu Bahasa Indonesia memperlihatkan kecondongan spesifikasi daripada Bahasa Inggris, misalnya kata *rice* dalam Bahasa Inggris, kita mempunyai *padi, gabah, beras, nasi*; Bahasa Inggris mengenal kata *see*, kita mengenal *menengok, melihat, menonton, menjenguk, memandang, merenung, menatap, memperhatikan, menengadahkan, mengerling, menoleh, melangut, mengintai, mencamkan, meninjau, mendelik* (= 16 kata). Akan tetapi, dalam lapangan lain Bahasa Indonesia memperlihatkan kecondongan generalisasi, misalnya dalam istilah kekerabatan, kata *anak* dan *saudara* tak ada padannya dalam Bahasa Inggris yang sama “general”nya.

Sampai berapa jauh Bahasa Indonesia memperlihatkan kelincahan bergerak dari kutub generalisasi ke kutub spesifikasi masih harus kita lihat perkembangannya.

penguraian lawan perumusan

Ada orang beranggapan, bahwa nilai suatu bahasa ditentukan oleh kekayaannya akan kata-kata yang dapat merumuskan konsep-konsep yang berangkai-rangkai; sedangkan bahasa yang mempergunakan frase (= rangkaian kata = “kata-kata

yang panjang”) tidaklah efisien. Seperti kata Punya Sloka Ray (1963:128) kata itu mudah pemakaiannya tetapi kita harus hafal artinya; sebaliknya apabila kita memakai frase, akan mudah dimengerti. Jadi, dalam membuat ungkapan-ungkapan baru tak selamanya kita harus mencari kata tunggal, karena efisiensi komunikasi itu tidak hanya pada segi ungkapan, tetapi juga pada segi makna.

Dalam pengungkapan ilmiah kedua segi bahasa itu perlu benar diperhatikan.

kemenduaan dan kesamaran

Kemenduaan (*ambiguity*) diharamkan dalam logika, seperti dikatakan oleh Stebbing (1958:21). Ada 2 macam kemenduaan, yakni kemenduaan leksikal (mis. la memberi *tahu* kepada kami) dan” kemenduaan struktural (mis. *Istri kolonel yang nakal itu cantik*). Untuk bahasa di luar ilmu pengetahuan kemenduaan tidak dapat dihindari bahkan dimanfaatkan (misalnya dalam kesusastraan, diplomasi, teka-teki, lelucon). Dari segi linguistik teoritis, soal kemenduaan harus dianggap sebagai ‘pseudoproblem’: secara transformasional-generatif, tak mungkin kita menghadapi kemenduaan kalau kita dapat menghubungkan “surface structure” dan “deep structure”; secara tagmemik, kemenduaan tidak menjadi soal, kalau kita mengakui adanya satuan-satuan linguistis yang lebih tinggi daripada kalimat, dan mengenal tagmem-tagmemnya dalam wacana misalnya.

Cara-cara menghindari kemenduaan, diuraikan oleh Poerwadarminta (1967:114-5).

Sebaliknya dalam logika, kesamaran bukanlah dosa (Stebbing 1958:19), karena untuk mencapai perumusan yang tepat kita harus mempergunakan ungkapan-ungkapan (kata, kalimat) yang kadang-kadang belum jelas bagi kita.

afiksasi sebagai pengungkap komponen-komponen semantis

Adanya sistem afiks mempermudah ekspresi, karena kita tidak harus mempergunakan banyak kata untuk perubahan-perubahan kecil dari ungkapan. Misalnya, makna morfem dasar *satu* dapat dikembangkan dan disempitkan dengan mempergunakan afiks: *satuan, kesatuan, persatuan, penyatuan, menyatu, menyatukan, bersatu* dan sebagainya. Untuk tiap bentuk itu kita tak perlu

memakai kata-kata yang berlainan. Salah satu keuntungan sistem afiks Bahasa Indonesia ialah bahwa satu afiks dengan afiks lain ada hubungannya, misalnya:

ajar { belajar - pelajar - pelajaran
mengajar - pengajar - pengajaran

Kemampuan generatif sistem afiks Bahasa Indonesia ini belum diselidiki.

Dalam perkembangannya Bahasa Indonesia telah mengasimilasikan afiks dari bahasa lain, karena keperluan akan alat-alat pengungkap komponen-komponen semantis yang baru (Harimurti Kridalaksana 1966 dan 1967).

4. Masalah terjemahan

Wonderly (1968:50 dan seterusnya) yang mengutip Nida, membedakan dua macam penterjemahan, yakni penterjemahan (yang mementingkan kesamaan) formal dan penterjemahan (yang mementingkan kesamaan) dinamis. Penterjemahan dinamis pertama-tama berusaha untuk menyampaikan isi amanat dalam bahasa sumber dengan ungkapan-ungkapan yang lazim dalam bahasa terjemahan. Penterjemahan dinamis dilakukan dengan tiga langkah: 1) analisis atau dekomposisi terhadap bahasa sumber dengan mempergunakan konsep-konsep dasar; 2) memindahkan konsep-konsep dasar itu menjadi konsep-konsep dasar dalam bahasa terjemahan; 3) rekomposisi atas hasil 2) itu dalam bahasa terjemahan. Jelas, penterjemahan dinamis jauh lebih baik daripada penterjemahan formal.

Terjemahan karya ilmiah dalam Bahasa Indonesia banyak yang tidak memuaskan, karena para penterjemah tidak terlatih, dalam ilmu penterjemahan (suatu aspek linguistik terapan yang telah menjadi disiplin ilmiah tersendiri).

Misalnya salah satu terjemahan buku ilmu pengetahuan populer diprakatai dengan:

“Suatu fikiran yang salah yang tersebar dengan luas sekali di kalangan orang banyak menggambarkan buku-buku sebagai benda yang tak berjiwa, tidak efektif, serba damai yang pada tempatnya sekali berada dalam kelindungan-kelindungan sejuk dan ketenangan akademis dari biara-biara dan universitas-universitas dan tempat-tempat pengasingan diri yang lain yang jauh dari dunia yang jahat dan materialistis ini” (Asrul Sani 1959:7).

Buku aslinya berbunyi:

“A popular delusion widely prevalent holds that books are inanimate, ineffective, peaceful objects, belonging to the cloistered shades and academisc quiet of monasteries, universities, and other retreats from a materialistic evil world” (R.B. Down 1956:7).

Buku terjemahan itu penuh dengan kalimat-kalimat demikian; di samping itu banyak buku lain yang diterjemahkan secara demikian.

Sudah saatnya penterjemahan dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dalam ilmu penterjemahan.

5. Penggunaan istilah

Ilmu pengetahuan tidak dapat berfungsi tanpa istilah. Dalam hubungan ini kita mesti membedakan *kata* yang kita pergunakan sehari-hari dan *istilah* yakni ungkapan yang mempunyai makna tetap dan tertentu dalam cabang ilmu yang memakainya.

Istilah bisa dibentuk dengan:

- 1) menciptakan kata atau ungkapan yang baru sama sekali,
- 2) mengambil kata atau frase biasa dan memberinya makna atau defmisi yang tetap dan tertentu,
- 3) menterjemahkan istilah asing,
- 4) meminjam istilah dari bahasa daerah,
- 5) mengadaptasi istilah asing menurut kaidah-kaidah Bahasa Indonesia.

Pembentukan istilah di negeri kita dilakukan oleh Komisi Istilah, yang menurut hemat kami, tugasnya ialah:

- 1) mengaji istilah-istilah yang telah dibentuk,
- 2) membentuk istilah baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan Bahasa Indonesia,
- 3) menyelidiki sampai berapa jauh istilah-istilah itu dipergunakan dalam dunia ilmu yang bersangkutan, dalam pengajaran di sekolah-sekolah dalam buku-buku, dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya,
- 4) menyusun kamus istilah baik yang multilingual maupun yang berisi definisi-definisi istilah,
- 5) memberi nasihat kepada instansi-instansi yang memerlukan istilah,
- 6) menyebarluaskan istilah yang sudah dibentuk.

Hingga akhir tahun 1966 Komisi Istilah telah mengumpulkan dan membentuk 327.927 istilah - banyak di antaranya belum dapat diperbarui karena Komisi Istilah itu sejak 1967 dihentikan kegiatannya oleh Pemerintah.

6. Persoalan lain

Kemampuan maksimal Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan baru dapat tercapai, jika para pemakainya telah banyak membuat eksperimen-eksperimen dalam bidangnya dengan bahasa itu, dengan perkataan lain, apabila kita banyak menulis karangan-karangan ilmiah dalam Bahasa Indonesia. Selama ini belum kita lakukan tak dapat kita katakan, bahwa Bahasa Indonesia tak mampu menjadi bahasa ilmiah.

Untuk sebagian persoalan Bahasa Indonesia dewasa ini, sebagai tercermin dalam penggunaannya sebagai bahasa ilmiah, terletak pada penyediaan fasilitas penerbitan dan percetakan, komunikasi, daya beli para pemakai bahasa dan lain-lain. Jadi, pada faktor-faktor non-linguistik.

28 Oktober 1968

2. REFORMASI EJAAN 1972

(Pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto diresmikanlah ejaan resmi Bahasa Indonesia yang disebut *Ejaan Yang Disempurnakan*. Sistem ejaan ini tumbuh dari sistem Ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan 1966. Dari tahun 1966 hingga tahun 1972 penulis ikut aktif dalam panitia ejaan, dan telah menulis belasan artikel, baik ilmiah maupun populer, mengenai soal ini. Salah satu faktor yang mendorong penulis ikut aktif di dalamnya ialah kenyataan, bahwa usaha pembaharuan ejaan telah diamanatkan dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954; dan pekerjaan sekarang ini tidak lain daripada meneruskan usaha para pelopor Bahasa Indonesia dalam kongres tersebut. Di sini dimuat salah satu karangan penulis mengenai soal yang pernah dan akan tetap aktual dalam sejarah Bahasa Indonesia).

Setahun telah berlalu sejak ejaan baru diperkenalkan kepada masyarakat. Selama ini suara pro dan kontra berganti-ganti terdengar, berkisar dari yang seratus prosen menyokong dan langsung mempergunakan sistem ejaan baru sampai kepada yang gigih menentang baik dengan sengaja dan dengan maksud-maksud tertentu maupun karena kurang pengertian dan kurang penerangan. Meskipun kadang-kadang pedas telinga kita mendengar kritik-kritik yang tidak tepat (kritik membangun kita terima dan kita pertimbangkan dengan dada lapang), namun daripadanya kita dapat melihat titik-titik terang, yakni bahwa bahasa nasional kita yang diterima rakyat begitu saja mendapat sorotan yang agak sungguh-sungguh

dengan timbulnya ejaan baru ini. Bahwasanya tak sedikit di antara sorotan itu meleset, dapatlah kita mengerti, karena tidak semua orang mampu untuk memberi pandangan yang tepat tentang bahasa, sekalipun kita semua mengakui, bahwa bahasa itu milik masyarakat. Hukum misalnya juga milik masyarakat, tetapi yang mampu memberi telaah tentu saja hanyalah ahli-ahli hukum. Begitu pula kemakmuran adalah persoalan seluruh rakyat, tetapi yang benar-benar tahu seluk-beluknya hanyalah ahli-ahli ekonomi. Pembinaan hukum, ekonomi, kesehatan, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan segi-segi kehidupan lain sudah barang tentu tidak bisa diserahkan kepada orang-orang yang hanya sedikit tahu ataupun yang sama sekali tak tahu tentang masalah-masalah itu. Demikian halnya pembinaan bahasa - milik masyarakat - adalah bidang dan tugas para ahli bahasa. Ini bukanlah kesombongan, tetapi jika kita akan membangun negara dan masyarakat kita secara harmonis, prinsip pembagian pekerjaan perlu kita sadari dan kita laksanakan.

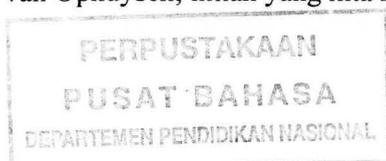
Keahlian dan kecintaan kepada bahasa national kita itulah yang menjadi latar belakang usaha-usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia.

Riwayat Ejaan Baru

Yang dimaksud dengan ejaan adalah sistem atau aturan perlambangan bunyi bahasa dengan huruf (cq. huruf Latin), aturan menuliskan kata-kata dan cara-cara mempergunakan tanda baca.

Karena tiap bahasa itu selalu berubah-ubah, pada masa-masa tertentu perlu diadakan inventarisasi atas perkembangan yang telah tercapai. Misalnya, bahasa dari Abdullah bin Abdulkadir Munsyi tidak sama dengan Bahasa Melayu 1928 yang juga tidak sama dengan Bahasa Indonesia sekarang. Untuk tiap masa bahasa berlaku kaidah-kaidah, tertentu, demikian pula ejaannya. Aturan tulis-menulis yang ditetapkan tahun 1901 (ejaan van Ophuysen) tentu saja tidak tepat untuk tahun 1968. Inilah salah satu sebab usaha-usaha pembaharuan ejaan bahasa kita. Bahasa kita terus maju, sesuai dengan perkembangan kehidupan pemakainya.

Dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo, Ki Hadjar Dewantara dan Dr. Purbatjaraka, mengusulkan supaya ejaan internasional diajarkan juga di sekolah-sekolah. Pada tahun 1947 Pemerintah menetapkan perubahan atas ejaan van Ophuysen; inilah yang kita kenal dengan nama ejaan Suwandi. Dalam



Kongres Bahasa Indonesia ke-II di Medan diusulkan juga supaya ejaan Suwandi itu diperbaiki sehingga kita kenal Panitia Ejaan Prof. Priono dan E. Katopo (1956) dan Panitia Ejaan Prof. Slametmuljana dan Syed Nasir (1959). Tak satu pun di antara hasil-hasil panitia itu dilaksanakan karena perkembangan politik yang terjadi.

Sesudah konfrontasi dihentikan, usaha penyatuan ejaan dengan Malaya/Malaysia dihidupkan kembali. Atas prakarsa sendiri Komando Operasi Tertinggi (bukan badan bahasa!) mengadakan pendekatan tentang kerja sama bahasa ini dengan Malaysia. Komando Operasi Tertinggi dengan sepengetahuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan minta kepada Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK) supaya menyusun konsep ejaan yang akan diajukan kepada pihak Malaysia. Sebagai warga negara yang selalu siap menjayakan program pemerintahnya, para ahli yang bertugas di LBK selesai menyusun konsep ejaan pada Agustus 1966, tentu saja setelah meneliti konsep-konsep terdahulu. Konsep ini diperkenalkan lebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat kritik-kritik dan baru pada bulan Juni 1967 dibicarakan dengan pihak Malaysia dan hampir seluruh konsep itu diterima oleh pihak Malaysia. Ejaan LBK inilah yang menjadi proyek kita bersama.

Perintah untuk memperkenalkan ejaan baru ini datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto dengan rencana akan diresmikan pada 17 Agustus 1967, tetapi karena perkembangan politik rencana itu tidak terlaksana dan baru pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri SH soal ini diputuskan oleh kabinet RI.

Jadi pada dasarnya, ejaan baru ini merupakan perbaikan ejaan Suwandi dan sekaligus penyamaan dengan ejaan Malaysia.

Prinsip-prinsip Ejaan

Dalam menyusun sistem ejaan suatu bahasa beberapa prinsip standardisasi bahasa menjadi pegangan:

- I. PRINSIP KECERMATAN: sistem ejaan adalah suatu sistem yang tidak boleh mengandung kontradiksi, jadi misalnya satu tanda sudah dipergunakan untuk melambangkan satu fonem, maka seterusnya tanda itu dipakai untuk fonem itu.

- II. PRINSIP KEHEMATAN: prinsip kehematan dalam arti penggunaan satu huruf untuk satu fonem tidak dapat menjadi pegangan; yang dituju dalam pembaharuan ejaan ini lebih ke arah adanya standar yang mantap; dengan adanya satu standar itu maka orang dapat menghemat tenaga dan pikirannya dalam berkomunikasi.
- III. PRINSIP KELUWESAN: suatu sistem ejaan tidak boleh menutup kemungkinan bagi perkembangan bahasa pada hari kemudian, sehingga dalam ejaan baru diresmikan penggunaan *f* misalnya untuk *aktif, sifat, fakultas*. Dalam ejaan Suwandi tak ada ketetapan tentang huruf-huruf *f, v, z, sj* (baru: *sy*), *ch* (baru: *kh*), padahal selama ini lazim kita pakai: *sifat, valuta, zen, sjarat* (baru: *syarat*), *chusus* (baru: *khusus*).
- IV. PRINSIP KEPRAKTISAN: dalam ejaan baru diusahakan supaya tidak mempergunakan huruf-huruf baru yang tidak lazim. Oleh sebab itu dalam ejaan baru tak ada huruf-huruf baru dan karenanya kita tak perlu mengganti mesin tik dan sebagainya. Salah satu fakta yang dapat kita catat ialah bahwa penggunaan tanda-tanda diakritis lebih kurang praktis daripada penggunaan huruf ganda, oleh sebab itu huruf-huruf ganda *ng, ny, sy, kh* yang masing-masing menggambarkan fonem tunggal masih dipertahankan dan tidak diganti dengan huruf-huruf baru atau huruf-huruf yang memakai tanda diakritis.

Keempat prinsip ini disebut berurutan, namun pelaksanaannya saling melengkapi.

Ejaan itu bukan hanya mengatur cara menulis huruf, tetapi juga cara menulis kata dan cara mempergunakan tanda baca.

Ini semua tidak diatur dalam ejaan Suwandi, dan inilah yang mendorong kita untuk memperbaharui ejaan tersebut.

Soal kalah-menang dengan Malaysia

Di Malaysia sekarang berlaku 4 sistem ejaan, yakni ejaan Wilkinson, ejaan Za'ba, ejaan Fajar Asia, dan ejaan Konggres. Kalau ada yang menuduh ejaan baru meniru ejaan Malaysia, kita boleh bertanya: Ejaan Malaysia yang mana?

Justru adanya ejaan baru (yang notabene hasil karya ahli-ahli Bahasa Indonesia) disambut oleh rakyat Malaysia untuk mengatasi kekacauan ejaan selama ini di Malaysia.

Dari segala kekacauan ejaan di Malaysia sekarang, kita dapat mencatat perubahan-perubahan yang harus mereka lakukan berhubungan dengan persamaan ejaan ini, yakni (1) huruf *ch* diganti dengan *c*; (2) huruf *sh* jadi *sy*; (3) awalan *ka-* jadi awalan *ke-*; (4) awalan *sa-* jadi *se-*; (5) awalan dan akhiran biasanya ditulis dengan tanda '- ', dalam ejaan baru dihapus seperti di Indonesia; (6) kata-kata *agong*, *tutor*, *burong* dan yang serupa menjadi *agung*, *tutur*, *burung* dan sebagainya; (7) kata-kata seperti *pilih*, *titek*, *sulet* dan yang serupa ditulis jadi *pilih*, *titik*, *sulit* dan sebagainya; (8) kata-kata seperti *mahu*, *ra' ayat* dan sebagainya jadi *mau*, *rakyat* dan sebagainya.

Jadi kalau tidak dipaksa ditantang soal kalah-menang, dengan tegas kami menyatakan *Indonesia yang menang*, karena:

- I. konsep ejaan ini berasal dari Indonesia
- II. ejaan baru ini diterima seluruhnya oleh Malaysia untuk mengatasi kekacauan yang ada di sana
- III. Indonesia mengalami 6 perubahan penulisan huruf (yang sistematis, sehingga mudah diingat dan dipelajari); Malaysia mengalami 8 perubahan (yang relatif tidak sistematis, sehingga harus dibuat daftar kata-kata khusus).

Bagi bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia, sungguh memalukan bicara tentang kalah-menang dengan bangsa lain sahabat kita. Kami heran, bahwa inilah reaksi pertama yang kami terima: orang tidak tahu-menahu bagaimana ejaan Malaysia sebenarnya, sudah menuduh kita meniru mereka.

Para ahli Bahasa Indonesia dan Malaysia serta rakyat Malaysia tidak pernah memikirkan kalah-menang ini. Yang penting ialah: bagaimana kita membina bahasa kita secara rasional menjadi bahasa yang modern sesuai dengan pertumbuhan masyarakat yang memakainya.

Ejaan baru dan ejaan bahasa-bahasa lain

Ada yang menuduh bahwa ejaan baru ini menyerupai ejaan Inggris. Kita boleh bertanya: yang mana sama? Apakah penggunaan huruf *y* yang juga dipergunakan dalam Bahasa Prancis dan Bahasa Spanyol? Apakah penggunaan *j* - sebagai ganti *dj*? Sudah ratusan tahun *j* dipakai untuk mengganti *dj* misalnya dalam transkripsi Bahasa Sanskrit, Arab, Jepang, Jawa Kuna dan sebagainya. Bahasa Inggris memakai *ch*, kita pakai *c* untuk mengganti *tj*. Dalam Bahasa Inggris untuk menulis /f/ dipergunakan *f* atau *gh* misalnya *full* dan *rough*, tetapi *gh* kadang-kadang “tidak dibunyikan”, misalnya *through*. Apakah ejaan baru serupa ini? Dilihat dari segi apa pun, ejaan baru tidak meniru ejaan Inggris.

Kita tak boleh lupa, bahwa ejaan baru disusun untuk Bahasa Indonesia, jadi kata-kata asing, seperti *coca-cola*, *Marcos*, *Claudia*, *Zurich* dan sebagainya harus dibaca menurut bahasanya masing-masing.

Ada yang bertanya; mengapa ejaan Inggris yang begitu buruknya sudah ratusan tahun tidak diganti-ganti, dan kita coba mengganti ejaan kita pula? Ketahuilah, bahwa seorang anak Inggris yang belajar membaca dan menulis memerlukan waktu 3 kali lebih banyak daripada seorang anak yang belajar ejaan fonemis, seperti ejaan baru kita ini. Tiap kata Bahasa Inggris mempunyai ejaannya sendiri, seorang anak Inggris harus terus belajar ejaan dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi!

Apakah kita akan meniru, cara-cara Inggris dengan membuang waktu, tenaga dan biaya hanya untuk belajar ejaan?

Pembaharuan ejaan dan pelaksanaan Repelita

Ada yang menyatakan, bahwa soal ejaan baru tidak penting, pelaksanaannya harus ditunda karena akan mengganggu pembangunan dan akan menghambat pelaksanaan Repelita.

Dengan ejaan baru tak perlu kita mengganti mesin tik dan mesin cetak; buku-buku yang sudah beredar tak perlu dibakar dan diganti; nanti kalau dicetak ulang, barulah ejaan baru digunakan. Masa transisi sudah dipikirkan oleh pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk belajar ejaan baru tak perlu kurikulum sekolah diganti. Anak-anak yang mengikuti soal-soal lewat

televisi hanya memerlukan waktu satu malam untuk menyesuaikan diri dengan ejaan baru ini. Jangan lupa pembangunan tidak hanya berarti menambah sandang, pangan, dan perumahan rakyat saja, tetapi juga pembinaan kebudayaan, termasuk pembinaan bahasa nasional, dengan modernisasi ejaan sebagai langkah pertama yang mudah dilaksanakan. Oleh ejaan baru ini tak seorang pun dirugikan, sektor pembangunan mana yang dihambat olehnya?

Masalah ejaan baru adalah masalah yang sangat sederhana, kita tak perlu membesar-besarkan apa yang tak besar dan tak usah mencari-cari apa yang tak ada.

Apa hubungan ejaan Bahasa Indonesia yang baru ini dengan ejaan bahasa-bahasa daerah dalam huruf Latin?

Pembaca yang kurang mengerti tentu kecewa, kalau pertanyaan ini kami jawab tidak ada. Mudah-mudahan setelah membaca karangan ini kekecewaan itu akan lenyap.

Walaupun banyak persamaannya, soal bahasa-bahasa daerah dan soal Bahasa Arab adalah dua soal yang berbeda, oleh sebab itu kami akan membagi dua karangan ini.

Tak ada bahasa yang sama di dunia ini. Bukan hanya Bahasa Inggris berbeda dari Bahasa Rusia, Bahasa Cina, dan Bahasa Indonesia, tetapi juga Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Batak Toba, Bahasa Makasar, dan 200 bahasa lain di Indonesia ini berbeda-beda. Salah satu prinsip linguistik ialah bahwa tiap bahasa merupakan sistem yang unik; kaidah yang berlaku bagi suatu bahasa belum tentu kena bagi bahasa lain. Tiap bahasa mempunyai pola bunyi, pola bentuk, pola makna, perbendaharaan kata yang khas dengan kaidahnya yang khas pula. Contoh, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Bali, Bahasa Madura dan Bahasa Sasak membedakan tingkat-tingkat bahasa menurut stratifikasi sosial yang berlaku dalam masyarakat masing-masing. Tingkat-tingkat bahasa itu tak bisa diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain yang tak mempunyai sistem itu, dalam Bahasa Melayu misalnya. Kecuali itu, tingkat-tingkat bahasa yang ada dalam Bahasa Jawa tidak sama dengan yang ada dalam Bahasa Bali serta dengan lainnya.

Bahasa berbeda-beda bukan hanya dalam hal-hal yang rumit seperti tingkat bahasa itu, tetapi juga dalam sistem bunyi bahasanya, misalnya Bahasa

Jawa membedakan bunyi /t/ dan /T/ dalam pati ‘kematian’ dan paTi ‘tepung’, juga antara /d/ dan /D/ dalam *wedi* ‘takut’ dan *weDi* ‘pasir’. Perbedaan yang demikian tak dikenal dalam Bahasa Indonesia. Bunyi-bunyi khusus juga kita kenal dalam bahasa-bahasa daerah seperti nyata pada nama-nama *Meulaboh* (Aceh), *Pameungpeuk* (Sunda), *Pati* (Jawa) yang masing-masing harus diucapkan menurut aturan bahasa daerah itu masing-masing.

Ejaan sebagai kaidah yang mengatur perlambangan bunyi bahasa dengan huruf (cq. huruf Latin) juga merupakan sistem yang unik. Jadi dalam Bahasa Jawa perbedaan antara *tutuk* ‘mulut’ dan *TuTuk* ‘pukul’ harus pula dinyatakan dalam ejaan Jawa bertulisan Latin (biasanya untuk fonem /T/ dan /D/ ejaan Jawa mempergunakan *t* dan *d* yang bertitik). Perbedaan yang demikian tak ada dalam Bahasa Indonesia, jadi jangan dimasukkan dalam ejaan Indonesia, sekalipun sama-sama mempergunakan huruf Latin atau Romawi. Kalau lambang-lambang semacam ini serta lambang-lambang lain yang menggambarkan bunyi-bunyi lain dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia sebanyak 200 buah itu dimasukkan dalam ejaan Bahasa Indonesia alangkah beratnya ejaan kita itu. Ejaan baru yang kami gunakan dalam karangan ini adalah ejaan untuk Bahasa Indonesia; untuk bahasa-bahasa daerah yang bertulisan Latin (Ingat, penerapan norma bukan berarti penerapan sistem atau pemindahan sistem!), misalnya Bahasa Sunda: *Tjiburuj* → *Ciburuy*, *Djatiwangi* → *Jatiwangi*, *peujeum sampeu digulaan tjolenak* → *peuyeum sampeu digulaan colenak*; Bahasa Jawa: *Wanatjala* → *Wanacala*, *Banjubiru* → *Banyubiru*, *tjublak-tjublak suweng* → *cublak-cublak suweng* dan sebagainya dan sebagainya. Demikian pula untuk bahasa-bahasa daerah lain. (Para ahli yang mengenal Bahasa Melayu Kuna, Bahasa Sunda Kuna, Bahasa Jawa Kuna dan Bahasa Bali Kuna tentu tidak akan menganggap usul kami sebagai usul yang baru).

Bahasa Arab mempunyai tempat yang khusus di Indonesia, bukan hanya karena pengaruhnya yang sangat dalam terhadap Bahasa Indonesia, tetapi juga karena sampai kini masih dipergunakan sebagian besar rakyat kita sebagai bahasa suci. Sayang, masih banyak yang salah paham dalam hubungannya dengan ejaan baru.

Pengaruh yang paling besar dari Bahasa Arab terhadap Bahasa Indonesia ialah dalam perbendaharaan kata-kata. Kata-kata seperti *pikir*, *ngelamun*, *asli*,

syarat, iklan, bina, abadi. senin; selasa (dan nama-nama hari lain), serta ratusan lainnya sudah diasimilasikan ke dalam bahasa kita sepenuhnya, sehingga tak tampak sifat Arabnya. Bunyi [s] dalam *senin* yang sama dengan bunyi [s] dalam *asli*, dalam kata Arabnya merupakan dua bunyi yang berlainan sama sekali, tetapi karena perbedaan itu tak ada dalam Bahasa Indonesia/Melayu dan bunyi-bunyi Arab itu sudah “diucapkan dengan lidah Indonesia”, perbedaan itu diabaikan dan tidak digambarkan dalam ejaan Indonesia, baik lama maupun baru.

Pendek kata, kata-kata Arab yang sudah sepenuhnya diasimilasikan dalam Bahasa Indonesia dieja menurut aturan ejaan baru Bahasa Indonesia.

Lain halnya dengan kata-kata Arab yang masih asli dan dipergunakan dalam sembahyang, dalam Kitab Al Kuran dan sebagainya, harus diatur sendiri, karena ini menyangkut Bahasa Arab. Seperti kami uraikan di atas, tiap bahasa merupakan sistem yang unik. Jadi, kalau kita akan menuliskan Bahasa Arab dengan huruf Romawi, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah Bahasa Arab sendiri, dan tak usah kita pikirkan bahasa-bahasa lain. Begitu pula karena ejaan baru dibuat khusus untuk Bahasa Indonesia, maka kaidah-kaidah bahasa lain diabaikan.

Di Indonesia untuk penulisan Bahasa Arab, Departemen Agama mempunyai aturannya sendiri. Satu pemikiran bagi para ulama di Departemen Agama: kalau norma-norma ejaan baru Bahasa Indonesia ditetapkan dalam sistem yang dipergunakan di Departemen Agama, maka pastilah sistem Indonesia itu akan serupa dengan praktek-praktek transliterasi yang dipergunakan di negara-negara Islam, misalnya *j* untuk *jim*, *y* untuk *ya*, *kh* untuk *kha* dan sebagainya.

Kita menggunakan ejaan baru khusus untuk Bahasa Indonesia, tetapi tidak berarti kita menutup mata terhadap norma-norma yang lebih luas pemakaiannya di dunia ini.

1 Desember 1968

3. SEJARAH PERISTILAHAN DALAM BAHASA INDONESIA*

Pengantar

Dalam penyelidikan mengenai sejarah kajian Bahasa Indonesia (SKBI) yang dilakukan di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, di samping mengembangkan teori untuk memperoleh wawasan yang menyeluruh tentang aspek bahasa Indonesia tersebut, dewasa ini terus-menerus dilakukan pengumpulan data yang akan mempertajam teori yang disusun itu.

Sampai kini yang dicakup di dalam SKBI ialah:

- (1) sejarah tata bahasa
- (2) sejarah perkamusan
- (3) sejarah pembinaan bahasa yang mencakup:
 - (a) sejarah perancangan bahasa
 - (b) sejarah aksara
 - (c) sejarah peristilahan
- (4) sejarah pengajaran Bahasa Indonesia
- (5) sejarah pengaruh tradisi kajian bahasa lain dalam Bahasa Indonesia
- (6) bibliografi mencakup:
 - (a) bibliografi tentang Bahasa Indonesia
 - (b) bibliografi tentang sejarah Bahasa Indonesia
- (7) biografi tokoh-tokoh Bahasa Indonesia

- (8) tinjauan kritis tentang penyelidikan Bahasa Indonesia dan sejarah Bahasa Indonesia.

Tidak perlu dijelaskan panjang lebar di sini bahwa dalam pengertian Bahasa Indonesia tersebut tercakup Bahasa Indonesia.

Dalam makalah ini disajikan beberapa data baru mengenai sejarah peristilahan. Dengan mempelajari data primer di bawah ini suasana masa lampau dapat lebih mudah dipahami. Pandangan ke belakang tentang masalah tersebut diharapkan dapat membekali wawasan kita dalam menghadapi masa depan Bahasa Indonesia.

Dalam menyusun sejarah peristilahan tersebut dapat dibedakan periode-periode berikut:

- I. periode perintisan 1938
- II. periode pelaksanaan 1942—1947
- III. periode pelaksanaan 1950—1970
- IV. periode pengembangan 1970—sekarang.

Seperti nyata di bawah ini, baik periode II maupun periode III merupakan periode pelaksanaan, tetapi tidak bersambung karena kegiatan kebahasaan pada umumnya, peristilahan pada khususnya, terputus oleh perjuangan kita untuk menegakkan kemerdekaan.

Periode I: Perintisan 1938¹

Pengembangan peristilahan pelbagai bidang kehidupan merupakan hasil jerih payah bangsa Indonesia sendiri. Sejak mulai dicetuskannya persoalan ini sampai pengembangannya hingga kini, sedikit sekali pengaruh luar negeri dalam bentuk gagasan atau dukungan menyusupinya. Pada waktu Bahasa Indonesia diproklamasikan sebagai bahasa persatuan tentulah orang tidak menyangka bahwa pengembangan Bahasa Indonesia akan sekompleks yang dihadapi dewasa ini. Namun, sepuluh tahun kemudian dalam Kongres Bahasa Indonesia I di Solo

¹ * Disajikan dalam Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya, IKIP Medan, 50-31 Januari 1990.

pada tahun 1938, masa depan Bahasa Indonesia sudah diantisipasi oleh para pemikir dalam Kongres itu, termasuk hal-hal yang menyangkut peristilahan, khususnya peristilahan ilmiah.

Dalam dalil-dalilnya mengenai *Menyesuaikan Kata dan Faham Asing kepada Bahasa Indonesia*, Mr. Amir Sjarifoeddin menegaskan:

1. Segala bahasa jang berevolusi pada soeatoe ketika akan menghadapi soal menjesoeaikan kata dan faham asing kebahasa sendiri.
2. Bahasa Indonesia pada saat ini menghadapi soal itoe dan teroetama pada saat ini Bahasa Indonesia menghadapi bahasa pengetahuan.
3. Dalam tiap-tiap bahasa, bahasa pengetahuan sebenarnja satoe bahasa terasing dari bahasa oemoem dan meroepakan soeatoe bahasa golongan.
4. Hal ini terang sekali dalam bahasa pengetahuan exact (dan djoega dalam bahasa pengetahuan jang tidak exact seperti dalam bahasa filosofie) dinegeri barat.
5. Sebab pengetahuan dinegeri Barat kebanyakan terikat dalam bahasa Graeco Romawi, maka disana bahasa pengetahuan terdiri atas bagian besar jang bersifat Graeco Romawi.
6. Bahasa-bahasa Barat inilah jang mendjadi perantara mengembangkan pengetahuan disebagian besar doenia sekarang.
7. Oleh sebab itoe soedah ada satoe vocaboelarioem jang hampir internasional berisi kata-kata pengetahuan. Kata-kata itoe pada masa ini terdapat didalam hampir segala bahasa jang didalamnja ada bahasa pengetahuan.
8. Membentoeok bahasa pengetahuan didalam Bahasa Indonesia dilakoekan dengah mengambil vocaboelarioem internasional tadi.
9. Mengambil kata-kata itoe mesti dilakoekan dengan memperhatikan atoeran-atoeran boenji kata-kata Indonesia.
10. Didalam melakoekan hal ini mesti djoega diperhatikan djangan soesoenan kalimat asing masoek kedalam bahasa Indonesia."

Yang terutama harus kita perhatikan ialah dalil 7 sampai 10. Atas dasar itu Kongres tersebut memutuskan,

"pada oemoemnja setoedjoe mengambil kata-kata asing oentoeok ilmoe pengetahuan. Oentoeok ilmoe pengetahuan jang sekarang, Konggres setoedjoe kalau kata-kata itoe diambil dari perbendaharaan oemoem. Pekerdjaan itoe hendaklah didjalankan dengan hati-hati, karena itoe perkara itoe patoetlah diserahkan kepada satoe badan."

Periode II: Pelaksanaan 1942-1947

Gagasan Kongres Bahasa Indonesia I tersebut segera diwujudkan. Baru pada zaman penjajahan Jepang, didesak oleh peraturan pemerintah penjajahan Jepang bahwa bahasa asing khususnya Bahasa Belanda dan Inggris dilarang di Indonesia, sibuklah orang membentuk istilah-istilah khusus untuk dunia pengajaran.

Pada tanggal 20 Oktober 1942 didirikanlah *Indonesiago Seibu Inikai* atau, dalam Bahasa Indonesia, *Panitia Goena Menjempoernakan Bahasa Indonesia* sebagai bagian dari Kantor Pengajaran Bala Tentara Jepang. Dalam berita pemerintah bala tentara Jepang yang disebut KAN PO nomor 9 terdapat pengumuman berikut:

MAKLOEMAT

Tentang menjernpoernakan Bahasa Indonesia

Oleh karena dimana-mana terasa perloe pimpinan oentoek mengatoer toemboehnja Bahasa Indonesia, maka oleh Kantor Pengadjaran telah diadakan Panitia goena menjempoernakan Bahasa Indonesia (*Indonesiago Seibu Inikai*) jang soedah dilantik pada tanggal 20 Oktober jang laloe.

Sekarang Panitia itoe soedah moelai bekerdja dan sekalian kantor, djabatn dll. hendaklah berhoeboengan dengan Panitia itoe tentang soal kata-kata, edjaan dan tata-bahasa jang terdapat dalam lingkoengan masing-masing, soepaja diperoleh persatoean bahasa jang sebaik-baiknya. Lagi poela kepada sekalian kantor, djabatn dll. diminta, soepaja memberi keterangan jang seperloenja kepada Panitia terseboet, apabila Panitia itoe menghadjati keterangan oentoek kepentingan kesempoernaan Bahasa Indonesia.

Alamat Panitia:

Mr. R. Soewandi (Penoelis oemoem), Kantor Pengadjaran, Djakarta
atau

Mr. St. Takdir Alisjahbana (Penoelis ahli), Balai Poestaka, Djakarta,

sedangkan alamat bagian-bagian Panitia:

Bagian I (bagian Tata-bahasa): Toean Sanoesi Pane, Balai Poestaka,
Djakarta,

Bagian II (bagian Pengoedji kata-kata baroe): Toean S. Mangoensarkoro,
Kantor Pengadjaran, Djakarta,
Bagian III (bagian kata-kata istilah): Toean Armijn Pane, Balai Poestaka,
Djakarta.

Djakarta, tanggal 11, boelan 12, tahoen 2602
Indonesiago Seibu linkai

Perkembangan lain terjadi di luar Jawa. Di Medan terbitlah sebuah buku berjudul *Istilah Bahasa Indonesia* yang diusahakan oleh *Lembaga Bahasa Indonesia* di bawah penilikan Djawatan Pendidikan dan diterbitkan oleh Tokaigansyu Seityo di Medan pada tahun 1944. Buku ini mengandung 1861 istilah berbahasa Belanda dalam bermacam-macam bidang dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia. Tebal buku kecil ini 84 halaman.

Sebagai karya pelopor dalam pengembangan Bahasa Indonesia buku ini pantas dicatat dalam sejarah kajian Bahasa Indonesia. Sambil mencatat nama tokoh-tokoh yang aktif di dalamnya, pengantar buku kecil itu dikutip secara lengkap di sini,

“Lembaga Bahasa Indonesia didirikan pada tanggal 15 Boelan Satoe 2603 di Medan. Jang menjadi ketoea Toean Aboe Bakar dan setia oesaha Toean Mangatas Nasoetion. Anggotanja berdjoemlah 28 orang, jaitoe:

1. Tk. Dr. Mansoer
2. Dr. Mohd. Amir
3. Djamaloedin Adi Negoro
4. Tk. Mr. Bahroen
5. Tk. Nikmatoellah
6. Tk. Jafizham
7. Mr. Mahadi
8. Tk. Amirhamzah
9. Tk. Mr. Moeh. Hanafiah
10. Tk. Abdul Hamid
11. H. Abdoel Malik Karim Amrullah
12. Tadjal
13. Arsil
14. Moesa
15. Madong Loebis

16. Wahab
17. M. Soeleiman
18. D. Dijar Karim
19. Jahjakoeb
20. A.D. Rangkoeti
21. Zahari
22. Dr. R. Abdul Manap
23. Mangatas Nasoetion
24. Dr. R. Pirngadi
25. Mr. Tk. Hassan
26. Hasanoelarifin
27. H.F. Sitompoel
28. Moehammad Kasim

Lembaga Bahasa Indonesia dibagi atas beberapa bahagian.

Bahagian edjaan:

Ketoea t. Hamka

Setia oesaha: T. Zahari

Anggota-anggota: t.t. Dr. Pirngadi, Jahja Jakoeb, Abd.
Wahab, Hasanoelarifin dan Mangatas
Nasoetion.

Bahagian Paramasastera:

Ketoea t. Madong Loebis

Setia oesaha: t. Mangatas Nst.

Anggota-anggota: t.t. Tk Jafizham, Moesa, A.D.
Rangkoeti dan Moehammad Kasim.

Bahagian Pembentoekek kata-kata:

Ketoea Dr. R. Pirngadi

Wk. Ketoea: Djamaloedin Adinegoro

Setia oesaha: Mangatas Nst.

Anggota-anggota: t.t. Mr. Mahadi, Mr. Tk. Hassan,
Arsil, Jahja Jakoeb, H.F. Sitompoel,
Tk. Amirhamzah dan Moehammad
Kasim.

Bahagian Kamoek dan Perbendaharaan Kata-kata:

Ketoea: T. Djamaloedin Adinegoro

Setia oesaha: T. Jahja Jakoeb

Setia oesaha II: T. Moehammad Kasim

Anggota-anggota: t.t. Madong Loebis, D. Djar Karim,
Hasanoelarifin, Dr. Mohd. Amir dan
Mangatas Nst.

Bahagian kitab-kita peladjaran:

Ketoea: T. Djar Karim

Setia oesaha I. T. A.D. Rangkoeti

Setia oesaha II t. Moehammad Kasim

Anggota-anggota: t.t. Tk Abdul Hamid, Moesa, Hamka,
Tadjal, Moehd. Soeleiman dan
Mangatas Nasoetion.

Tjara bekerdja :

- a. Tiap-tiap bahagian mengoesahkan, jang diwadjibkan kepadanya.
- b. Kepoatoesan-kepoatoesan bahagian itoe dioemoemkan dalam soerat kabar.
- c. Sekali seboelan diadakan perdjoempaan lengkap.
- d. Tiap-tiap anggota berhak mengemoekakan keberatan-keberatannya ataupun pendapatnya tentang kepoatoesan-kepoatoesan jang telah dioemoemkan itoe.

Bahagian pembentoe kato-kato bersidang sekali seminggoe, soedah lebih koerang setahoen lamanja, semendjak berdiri Lembaga Bahasa Indonesia. Teroetama jang dipentingkan terlebih dahoele, ialah keperluan pedjabat-pedjabat dan peroesahaan-peroesahaan, soepaja segala kato-kato asing dapat dilenjakkan dari soerat-menjoerat dan diganti dengan kato-kato Indonesia, kemoedian dioesahkan keperluan sekolah-sekolah dan pengganti kato Belanda jang oemoem dipakai orang banjak.

Pekerdjaan membentoe kato-kato tidak moedah. Kadang-kadang mentjari seboeah kato Indonesia, jang tjotjok sebagai pengganti kato asing itoe, memakan tempoh lebih koerang sedjam, oentoek membahasnja dan itoe poen adakalanja beloem dirasai memoeskakan. Kemoedian hasil oesaha kami itoe disiarkan dalam soerat kabar oentoek diperhatikan oleh chalajak ramai. Banjak djoega dari pihak loear datang pengetjaman atau tegoeran atau nasihat tentang beberapa kato. Segalanja itoe diperbintjangkan kembali dan diselidiki dengan teliti. Apabila kebenaran ada dipihak loear, maka kepoatoesan, jang telah diambil oleh Lembaga Bagian Istilah dioebah, diganti dengan kato, jang dioesoelkan oleh pihak loear itoe. Demikianlah salah satoe tjontoh tjara bekerdja membentoe kato-kato itoe.

Dalam mendjalin kato-kato asing, jang berkenaan dengan kepentingan pedjabat-pedjabat, senantiasa dioendang bermoesjawarat kepala atau wakil

moetlak dari pedjabat itoe, seperti kedjadian dengan pedjabat padjak, dagang, baitalmal, bia, pelaboehan, d.l.lnja.

Apabila ada kata-kata Arab, jang perloe dipoetoeskan, maka Lembaga mengoendang seorang, jang ahli dalam bahasa itoe, oentoek serta bermoesjawarat, agar soepaja Lembaga mendapat keterangan, atau nasihat, jang berdasar pada kebenaran djalan Bahasa Arab.

Lembaga Bahasa Indonesia bagian istilah mempersembahkan kitab ketjil ini kepada orang banjak, disertai dengan kejakinan, bahwa pekerdjaan kami ini djaoeh dari pada sempoerna.

Dari beberapa pihak kami mendapat desakan dan andjoeran, soepaja segala kepoetoesan, jang telah ada itoe, setjepat-tjepatnja haroes diboekoekan oentoek dipakai oleh orang-orang jang berkepentingan, teristimewa didaerah Soematera Timoer. Tetapi boleh dikatakan seloeroeh Soematera merasai keperloeannja kitab seperti ini dikeloerkan. Oleh sebab itoe maka kami memoetoeskan mengeloearkannja, walaupoen pekerdjaan kami beloem selesai benar, dan masih diteroeskan djoega.

Segala tambahannja nanti dapat disisipkan oleh pemakai kitab ini sendiri. Kami berharap seteroesnja, djikalau masih ada kata-kata, jang telah terbentoek itoe, mengandoeng kesalahan, harap dikirimkan tjatatan toean kepada kami, soepaja kami pertimbangkan sekali lagi, sebab menoeroet kata pepatah: Tak ada gading, jang tak retak.”

Demikianlah pengantar dalam buku yang amat bersejarah itu.

Pada tanggal 30 April 1945 Panitia Jakarta dibubarkan, namun telah menghasilkan ± 7.000 istilah baru. Istilah-istilah itu kemudian diterbitkan oleh Takdir Alisjahbana dalam *Kamus Istilah I dan II* (1945-1947).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 18 Juni 1947 didirikanlah Komisi Bahasa Indonesia, tetapi tidak dapat banyak bekerja karena pergolakan di negeri kita untuk menegakkan kemerdekaan. Namun, hasilnya yang lebih lumayan dapat dilihat dalam *Kamus Istilah* (1951).

Periode III: Pelaksanaan 1950-1970

Pada tahun 1950 Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku kecil yang berjudul *Bentuk Istilah*. Inilah pedoman pembentukan istilah yang cukup komprehensif yang memenuhi keperluan pada waktu itu. Karena banyak di antara kita tidak lagi mengenal buku penting ini, di

bawah ini kami kutipkan daftar isi buku tersebut:

“ISI KITAB

Kata Pengantar Kata Pendahuluan

1. Bahasa Indonesia dan daerah
2. Bahasa Arab dan Sanskerta
3. Pertuturan jang lajak kita ikuti

BAB. I

Peri memilih kata istilah

B A B . II

Kata istilah aseli

I. Istilah kata seasal

Andjuran ke-1. Hendaklah penjusun istilah itu menudju arah kesamaan

Andjuran ke-2. Pilihlah perkataan jang sudah hidup dalam bahasa.

II. Kata bersambungan

Andjuran ke-3. Tjari bentuk jg. sependek-pendeknja

A. Kata Benda

1. K.B. kedjuruan (penjelenggara)
2. K.B. mudjarad atau K.B. jang memperluas arti
 - a. K.B. turunan jang dibentuk langsung dari kata-asal
 - b. K.B. turunan jang dibentuk melalui K.K. bersambungan
3. K.B. Penundjuk hasil atau tudjuan pekerdjaan
 - (1) Kata2 jang memerlukan tambahan kata *tukang, djuru* atau *ahli*.
 - (2) Kata asing berachiran (is) *me*
4. Djamak K.B. susun

B. Kata Kerdja

1. Kata masdar (inpinitip)
2. a. K.K. berpotong (partisipium)
 - b. K.K. berpotong akan penjalin partisipium asing

C. Kata Sifat

1. awalan *her*
2. awalan *me*
3. awalan *di*
4. awalan *ter*
5. awalan *he* bersama-sama dengan achiran *an*
6. achiran *an*

Kata2 asing jang berachiran :

1. *ing*
2. *lijk*
3. *baar*
4. *achtig*
5. *isch*
6. *air*
7. *ief*
8. *aal*
9. *eus*
10. *rijk*
11. *ens*
12. *ant*

Tjataan tambahan.

B A B . III Istilah Pungut

I. Pemandangan umum

- a. Karena istilah asing tak tersalin dlm. bhs. Indonesia
- b. Karena kepentingan deret turunan
- c. Karena perlu untuk menjatakan perbedaan tingkat kepentingan atau djenis pekerdjaan

II. Tjara membuat kata turunan

III. Utjapan dan tulis

a. Utjapan

1. Alat tutur aseli
2. Alat bunji
3. Alat pungut
 - a. Konsonan
 - b. Alat bunji
 - c. Konsonan dua serangkai
 - (1) dua serangkai pada tempat pertemuan dua suku kata
 - (2) dua serangkai pada permulaan kata

- (3) dua serangkai pada akhir kata
- d. Konsonan tiga (empat) serangkai
 - (1) tiga (empat) serangkai pada tempat pertemuan suku kata
 - (2) tiga serangkai pada permulaan kata
 - (3) tiga serangkai pada akhir kata
- b. Tulis (edjaan)
 - Kata tunggal
 - Kata susun
 - Daftar istilah
 - Daftar singkatan.”

Patut kita kutip di sini sebuah pasal yang mengatur urutan sumber istilah. Pada halaman 6 terdapat rumusan berikut:

“PERTUTURAN JANG LAJAK KITA IKUTI

Segala sesuatu jang *saja perkatakan* diatas itu mudah-mudahan mendjelaskan dasar peraturan kepentingan bahasa-bahasa jang akan kita pakai sebagai tempat kita mentjari kata istilah, yakni:

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Daerah
3. Bahasa Arab
4. Bahasa Sanskerta
5. Kata-kata jang dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan
6. Bahasa asing jang lain-lain.”

Yang penting pula kita catat dari buku itu ialah pedoman untuk menuju ke arah kesatuan berupa tiga anjuran:

- “(1) Andjuran ke 1: Hendaklah penjusun istilah itu menudju arah kesamaan dalam memilih kata untuk istilah.
- (2) Andjuran ke 2: Pilihlah perkataan jang hidup dalam bahasa-bahasa kita (bahasa Indonesia atau daerah).
- (3) Andjuran ke 3: Tjarilah bentuk jang sependek-pendeknja.”

Buku kecil tersebut merupakan dokumen yang mencatat salah satu perkembangan bahasa Indonesia, khususnya yang bersangkutan dengan prosedur pembentukan istilah. Dengan menyimak buku itu kita dapat memahami bagaimana dan dari mana wujud istilah yang kita pergunakan sekarang dan yang kita terima sebagai hal yang wajar-wajar saja.

Kembali kita kepada badan-badan yang bertanggung jawab atas pembentukan istilah.

Pada tanggal 13 Mei 1950 di Jakarta dibentuk *Komisi Istilah yang* merupakan gabungan dengan Balai Bahasa (dibentuk di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1948; karena pendudukan Belanda tidak dapat menjalankan tugasnya). Komisi Istilah itu terdiri dari 16 Seksi yang semuanya dipimpin oleh Prof. Dr. Prijana. Pada tahun 1952 Komisi Istilah itu dijadikan instansi interdepartemental di bawah kabinet Perdana Menteri (kemudian Sekretariat Negara) dengan Lembaga Bahasa dan Budaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia bertindak sebagai Sekretariat.

Hasil Komisi Istilah itu mula-mula diterbitkan dalam majalah *Medan Bahasa* (no. 1 sampai 7, 1952); sejak bulan Oktober 1952 dijadikan lampiran majalah *Bahasa dan Budaya* yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Budaya FSUI.

Di samping daftar istilah tersebut, perlu juga kita catat adanya pembahasan tentang pedoman pembentukan istilah yang dimuat dalam *Medan Bahasa* 1952 (1-2) : 42-45. Pedoman yang paling sistematis tentang pembentukan istilah, khususnya di bidang kimia dan farmasi, termuat dalam *Bahasa dan Budaya* tahun 1958 jilid 7 no. 2, lampiran 43. Sebelum melanjutkan dengan hasil Komisi Istilah tersebut kami akan menyela karangan ini dengan apa yang diputuskan oleh Kongres Bahasa Indonesia II 1954 di Medan.

Kongres Bahasa Indonesia yang kedua itu juga berminat pada segi Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Marilah kita simak apa yang diputuskan oleh Komisi C setelah memperbincangkan *preadvis* Prof. Dr. Prijohutomo tentang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan:

“... maka Kongres Bahasa Indonesia mengandjurkan :

1. Istilah² jang telah biasa dipakai saat ini, diakui.
2. Istilah jang telah disiarkan oleh Komisi Istilah, supaja disaring dengan djalan berpegang kepada pengertian keseluruhannya, dan tidak hanja merupakan penterdjemahan kata² bahagiannya.
3. Semua istilah Internasional dalam lapangan ilmiah dan kebudajaan diterima dengan ketentuan diselaraskan dengan lisan Indonesia, apa bila perlu dan tidak merusak pengertiannya.
4. Untuk memperkaja perbendaharaan kata bahasa Indonesia, hendaklah terutama diambil kata² dari bahasa daerah dan bahasa jang serumpun.¹”

Jelas dari keputusan itu adanya kritik terhadap Komisi Istilah. Di tengah-tengah masyarakat terdapat keluhan tentang metode dan kemampuan para anggota komisi itu. Di samping itu cara penerbitan istilah itu menyulitkan orang untuk mencari suatu istilah karena dalam tiap terbitan istilah terdapat daftar hasil kerja dari pelbagai seksi. Kamus istilah hasil pelbagai panitia sedikit demi sedikit diterbitkan, tetapi tidak cukup cepat. Kamus-kamus itu ialah, antara lain *Kamus Kedokteran* 1954, *Kamus Kehewan* 1956, *Kamus Kimia* 1956.

Walau bagaimanapun, dari sudut jumlah hasilnya cukup memuaskan. Baiklah kami kutip di sini laporan dari S.W. Rudjiati Muljadi, yang pernah memimpin Lembaga Bahasa dan Kesusastraan:

“Pada waktu Komisi Istilah pada tahun 1966 terhenti kegiatannya, karena penghentian penyaluran keuangannya, tercatat 19 seksi yang masih aktif bekerja. Dalam sejarah hidupnya pernah tercatat 23 seksi yang telah mengumpulkan sejumlah istilah. Sebagian terbesar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, sebagian kecil dari bahasa Inggris. Seksi-seksi tersebut ialah :

a. Seksi-seksi Ilmu Pengetahuan Eksakta

Kedokteran	19.067	istilah
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.009	istilah
Kehewan	36.009	istilah
Teknik	27.293	istilah
Ilmu Pasti dan Alam	25.014	istilah
Kimia dan Farmasi	24.054	istilah

b. Seksi-seksi Non-Eksakta

Ilmu Bahasa dan Kesusastraan	7.644	istilah
Ilmu Hukum	6.081	istilah
Kesenian	14.054	istilah
Ekonomi	9.366	istilah
Pendidikan dan Psikologi	19.848	istilah
Administrasi	17.927	istilah
Kemiliteran	11.287	istilah
Pelayaran	20.965	istilah
Kesejahteraan Keluarga	12.281	istilah
Penerbangan	29.229	istilah
Geografi dan Sosiologi	9.008	istilah
Entomologi	6.522	istilah
Filsafat	918	istilah
Agama	4.707	istilah
Psikologi	743	istilah
Sosiologi	572	istilah
Sejarah dan Politik	<u>112</u>	<u>istilah</u>
	321.719	istilah

Ketua masing-masing seksi ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Istilah, dan masing-masing Ketua Dewan Pertimbangan Istilah menjadi anggota Panitia Kecil. Biasanya semua istilah yang diusulkan oleh suatu seksi diperbincangkan lagi dalam dewan. Jika belum dapat diterima oleh dewan, istilah itu dikembalikan ke seksi, dengan disertai saran perbaikan. Setelah tercapai persetujuan, istilah-istilah itu disiarkan di bawah tanggung jawab seksi yang bersangkutan.

Panitia Kecil bertugas untuk merapatkan hasil bermacam-macam seksi, yang kadang-kadang berupa istilah yang sama untuk bermacam-macam pengertian, ataupun kalau terdapat bermacam-macam istilah untuk satu pengertian.

Ada empat Dewan Pertimbangan Istilah; dan bersama-sama dengan seksi-seksi Ekonomi dan Keuangan, Ilmu Bumi dan Sosiologi, Seksi Ilmu Hukum masuk dalam Dewan Pertimbangan Istilah dan Panitia Kecil. digabung jadi Dewan Koordinasi.

Hasil-hasil Komisi Istilah biasanya dimuat sebagai lampiran pada majalah *Bahasa dan Budaya*, yang penerbitannya terhenti pada tahun 1962. Hasil-hasil yang pernah diterbitkan sebagai buku tersendiri kamus-kamus istilah (1) kedokteran, (2) kehewan, (3) teknik, (4) pelayaran, (5) kimia organik dan anorganik, (6) kerajinan wanita, (7) ilmu hukum,

(8) pendidikan, pengajaran dan ilmu jiwa, (9) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (10) ekonomi dan keuangan, (11) kedokteran, (12) kemiliteran, dan (13) ilmu pasti dan alam.

Buram-buram kamus istilah yang ada yang masih harus ditinjau lagi, agar siap cetak ialah buram kamus (1) administrasi, (2) kehewanian, (3) kesenian, (4) kemiliteran, (5) ilmu bumi dan sosiologi, (6) pendidikan dan psikologi, dan (7) ilmu hukum.”

Periode IV: Pengembangan 1970-sekarang

Dari tahun 1966 sampai 1972 terdapat kekosongan dalam penyusunan istilah-istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Memang di sana sini terdapat usaha untuk terus melaksanakan pekerjaan dalam bidang peristilahan, tetapi tidak meluas karena tidak ada dukungan dana. Dalam tahun 1966 diadakan simposium mengenai bahasa dan sastra Indonesia yang menyarankan agar kegiatan bahasa dan sastra dihidupkan lagi.

Titik balik dalam perkembangan peristilahan muncul ketika pada tahun 1972 dicanangkan kembali kerja sama bahasa antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai tindak lanjut peresmian Ejaan Yang Disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972, pemerintah membentuk *Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia yang* diberi tugas untuk menyusun 2 buku yang penting, yakni *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Pedoman yang kedua itu merupakan lampiran kedua dari SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 27 Agustus 1975 nomor 0196/U/1975.

Dalam buku kecil itu dibahas konsep-konsep dasar (seperti definisi istilah, tata nama, bentuk prototipe), sumber istilah, aspek tata bahasa peristilahan, aspek semantis peristilahan, istilah singkatan dan lambang, dan ejaan dalam peristilahan.

Yang perlu dicatat di sini ialah sumber istilah. Urutan yang dipakai ialah:

- “(1) kata dalam Bahasa Indonesia yang lazim;
- (2) kata dalam Bahasa Indonesia yang sudah tidak lazim;
- (3) kata dalam bahasa serumpun yang lazim;
- (4) kata dalam bahasa serumpun yang sudah tidak lazim;
- (5) kata dalam Bahasa Inggris;
- (6) kata dalam bahasa lain yang internasional.

Syarat bentuk istilah ialah:

- (1) ungkapan yang paling singkat;
- (2) ungkapan yang maknanya tidak menyimpang;
- (3) ungkapan yang tidak berkonotasi buruk;
- (4) ungkapan yang sedap didengar.

Proses yang menghasilkan bentuk istilah ialah:

- (1) penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal;
- (2) penyerapan tanpa perubahan;
- (3) penterjemahan;
- (4) penyerapan dan/atau penterjemahan.”

Pedoman tersebut menjadi dasar pembentukan istilah dalam Bahasa Indonesia maupun Malaysia, yang kemudian diikuti pula oleh Brunei. Dengan pedoman itulah para ahli melalui *Majelis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia menyusun* istilah dalam pelbagai bidang. Bila dikumpulkan, hasil kerja mereka sangat mengesankan, namun tidak sedikit kritik yang ditujukan terhadap cara kerja MABBIM dan kelompok-kelompok istilahnya. Kecaman yang diungkapkan orang adalah bahwa:

- (1) mereka menyusun istilah di luar konteks;
- (2) karena keasyikan mereka, mereka tidak pernah berusaha menyebarluaskan ke tengah masyarakat;
- (3) mereka tidak pernah berusaha untuk mencari umpan balik dari masyarakat;
- (4) pedoman yang disusun, khususnya versi terakhir tahun 1987, banyak mengandung ketidakkonsistenan, karena ingin mengatur hal-hal yang sudah terjadi, dan tidak berorientasi pada apa yang harus dilakukan kemudian; (Dalam Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia 1972 terdapat konsensus bahwa pedoman ejaan dan istilah hanyalah untuk mengatur masa depan bahasa Indonesia. Hal-hal yang sudah berlaku dalam masyarakat, apalagi sudah merupakan konvensi, hanyalah

diubah ejaannya sesuai dengan perubahan ejaan, tanpa mengotak-atik segi-segi lain.)

- (5) terdapat orientasi yang salah pada para penyusun pedoman itu, seolah-olah kaidah-kaidah Bahasa Indonesia berkiblat kepada Bahasa Inggris. (Dalam Simposium Bahasa dan Sastra 1966 disepakati bahwa istilah-istilah Inggris perlu diberi prioritas dalam pengindonesiaannya, jadi yang dimaksud sama sekali bukan agar Bahasa Indonesia berorientasi ke Bahasa Inggris.)

Pelajaran dari Sejarah

Kalau kita perhatikan buku *Istilah Indonesia* maupun *Kamus Istilah*, bentuk istilah selalu diusahakan agar “berbunyi” Indonesia dan dihindarkan istilah yang “berbau” barat. Istilah-istilah seperti *matematika*, *fisika*, *geografi*, tidak kita temukan; yang ada ialah istilah *ilmu pasti*, *ilmu alam*, dan *ilmu bumi* - yang dalam tahun-tahun kemudian justru dihindarkan. Mengapa?

Bila dikatakan bahwa nasionalismelah yang mendorong penghindaran istilah-istilah yang berbau asing, nampaknya tidak terlalu jauh dari kebenaran. Apalagi kalau kita ingat ucapan H. Agus Salim bahwa sejak Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan segala sesuatu yang berbau Belanda dibuang jauh-jauh, dan walau bagaimanapun, kita tidak mau “menjilat ludah sendiri” (informasi yang kami peroleh pada tahun 1966 dari saudara sepupunya, Muhammad Arif, Ketua Seksi Kimia-Farmasi Komisi Istilah, yang juga konseptor *Pedoman Pembentukan Istilah Kimia-Farmasi* yang kami sebut di atas), sebab-musabab terjadinya bentuk istilah semacam itu dapat kita pahami. Informasi itu diperkuat lagi dengan keterangan yang diberikan oleh Samoed Sastrowardoyo, yang oleh Amin Singgih disebut “otak” di belakang Ejaan Soewandi 1947, yang pernah mengatakan kepada penulis bahwa pada tahun-tahun sekitar proklamasi kemerdekaan segala sesuatu yang berbau Belanda, termasuk yang ada dalam sistem ejaan, oleh para penentu politik hendak dibuang jauh-jauh. Suasana ini mengingatkan kita pada suasana sekitar Bahasa Jerman pada akhir abad ke-19 yang menghasilkan kata-kata seperti *Nilpferd* ‘kuda Nil’ (sebagai pengganti *hipopotamus*), *Lautehre* (sebagai pengganti *phonetik*), *Wasserstoff* (sebagai pengganti *hydrogen*); dan kemudian juga *Femseher* (sebagai pengganti *television*), *Rundfunk* (sebagai pengganti *radio*).

Tanpa mengurangi kesaksian para pelaku sejarah yang kami catat di atas, kami juga melihat penyebab lain mengapa bentuk-bentuk Indonesia yang dipilih. Faktor itu ialah kenyataan bahwa pada zaman Jepang, yaitu pada masa-masa awal para ahli bahasa kita harus menyusun istilah dalam Bahasa Indonesia karena Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris dilarang; yang diizinkan hanyalah Bahasa Indonesia dan Jepang. Jadi, terpaksa mereka menyusun istilah yang tidak berbau barat.

Dalam periode ke-4 setelah tahun 1970, masalah “nasionalisme vs internasionalisme” muncul kembali: sampai berapa jauh kita mengungkapkan suatu konsep dengan mempergunakan bentuk-bentuk Indonesia atau yang dianggap Indonesia (misalnya *ilmu* tidak lagi dirasakan sebagai pinjaman dari Bahasa Arab, dan kata *bahasa* tidak lagi dirasakan sebagai pinjaman dari Bahasa Sanskerta, dan sampai berapa jauh kita mempertahankan bentuk internasional unsur-unsur serapan. Tarik-menarik di antara kedua kutub ini tidak pernah selesai sampai tuntas. Sebagian besar diserahkan kepada selera pencipta istilah. Sebagian lagi dikembalikan ke bentuk Latin-Yunaninya karena istilah yang masuk ke dalam Bahasa Indonesia lewat Bahasa Inggris tidak diserap secara fonetis seperti dipraktekkan orang di Malaysia. Misalnya, kata dalam Bahasa Inggris *rite dan site* tidak diindonesiakan menjadi *rait* dan *sait*, melainkan menjadi *ritus* dan *situs*, yaitu bentuk asalnya dalam Bahasa Latin.

Penggunaan bentuk Latin dan Yunani dalam peristilahan Indonesia bukanlah praktek yang aneh. Kita masih ingat penetapan kata *fakultas* dan *universitas* oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Muhammad Yamin, dan penetapan istilah *rektor* untuk mengganti presiden universitas oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat Muljadi Djodjmartono. Penggunaan istilah-istilah klasik barat tersebut lazim benar dalam ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sastra.

Dewasa ini masalah peristilahan dalam Bahasa Indonesia menjadi rumit karena munculnya dua kecenderungan lain, yakni penggunaan istilah Sanskerta-Jawa Kuna dan penghidupan kata-kata arkais.

Penggunaan istilah Sanskerta-Jawa Kuna - dan sedikit banyak Arab - sebetulnya sejajar dengan penggunaan Bahasa Latin-Yunani dalam peristilahan ilmu dan teknologi Eropa sampai sekarang. Bila bahasa-bahasa Eropa adalah pewaris kebudayaan Latin-Yunani, kita di sini mempergunakan kata-kata

Sanskerta-Jawa Kuna sebagai apresiasi kepada segala sesuatu yang bersifat klasik karena kedua bahasa itu pernah dipergunakan pada zaman dahulu di negeri ini. Bahwasanya Bahasa Sanskerta itu bahasa asing yang secara genetis tidak ada hubungan apa-apa dengan Bahasa Indonesia, tidak dipusingkan orang. Lain halnya dengan Bahasa Jawa Kuna yang masih serumpun. Pengaruh Sanskerta dalam Bahasa Indonesia sekarang memang tidak langsung dari India, melainkan melalui Bahasa Jawa Kuna, atau melalui ahli-ahli bahasa yang mengenal Bahasa Jawa Kuna. Yang terakhir ini sama dengan penggunaan kata-kata Latin seperti dijelaskan di atas.

Kebiasaan penggunaan kata-kata Sanskerta-Jawa Kuna bukannya tidak menimbulkan reaksi. Kebiasaan itu dianggap sebagai pertanda merajalelanya javanisasi dalam kebudayaan Indonesia. Orang pun bertanya-tanya mengapa hanya dipergunakan istilah-istilah Jawa Kuna saja; apakah tidak ada Bahasa Aceh Kuna, Makasar Kuna, Batak Kuna, dan sebagainya.

Maka timbullah kecenderungan lain dalam bahasa kita, yakni usaha untuk memanfaatkan kata-kata yang sudah tidak lazim dalam Bahasa Melayu-Indonesia atau hanya lazim di daerah-daerah tertentu. Inilah sumber kata-kata seperti *mantan*, *pantau*, *mangkus*, *sangkal* yang diperkenalkan orang dua tiga tahun terakhir ini, yang jelas tidak serta merta diterima orang. Di samping konservatisme, internasionalisme juga melatari penolakan kata-kata arkais itu.

Pertanyaan mengapa tidak dipergunakan kata-kata Aceh Kuna, Batak Kuna, dan sebagainya adalah wajar. Masalahnya ialah bekas-bekas bahasa-bahasa itu tidak ditemukan lagi. Memang sangat disayangkan. Ini satu lagi pertanda tiadanya kesinambungan historis dalam bahasa dan kebudayaan kita.

Mengapa sedikit istilah-istilah dari bahasa-bahasa daerah lain, di luar bahasa Jawa dan Sunda? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa putra-putri yang berasal dari pelbagai suku itu kurang aktif memperkenalkan kekayaan bahasanya. Bila demikian seterusnya *dejavanisasi* atau usaha untuk mengurangi pengaruh Bahasa Jawa hanya akan menjadi gerakan yang sangat lemah.

Penutup

Bila kita tengok kembali uraian di atas, patut kita catat bahwa dalam sejarah peristilahan bahasa kita terdapat dokumen-dokumen yang menjadi

tonggak sejarah, yakni:

- (1) *Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 1938*
- (2) *Istilah Bahasa Indonesia 1944*
- (3) *Bentuk Istilah 1950*
- (4) *Pedoman Pembentukan Istilah Kimia-Farmasi 1958*
- (5) *Pedoman Umum Pembentukan Istilah 1975.*

Dalam sejarah peristilahan Indonesia nampak menonjol sekali ketidakefektifan badan-badan yang disertai tugas membina peristilahan, padahal tidak sedikit dana dan tenaga yang dikeluarkan untuk membiayainya. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa peranan kreativitas pribadi atau orang swasta cukup besar dalam perkembangan peristilahan di Indonesia.

Kecenderungan dalam pemilihan istilah yakni nasionalisme, internasionalisme, klasisisme barat (penggunaan istilah Yunani-Latin), klasisisme timur (penggunaan istilah Sanskerta, Jawa Kuna, dan Arab), javanisasi, dan dejavanisasi, merupakan kecenderungan-kecenderungan yang tetap hidup, dan tidak akan surut dalam masa-masa yang akan datang ini.

Pengalaman penting bagi kita ialah bahwa pengembangan peristilahan hanya berhasil bila masyarakat diikutsertakan, dan para ahli bahasa tidak menutup diri dengan bersikap bahwa bahasa milik eksklusif mereka. Bila keterbukaan itu tidak dilaksanakan, sejarah akan berulang, yakni, seperti halnya dunia peristilahan dalam periode 1950-1970: banyak istilah yang dihasilkan dan dari sudut jumlah sangat mengesankan, tetapi tidak ada orang yang memakainya!

KEPUSTAKAAN

Adjat Sakri

1988 *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia, menyambut 60 tahun Sumpah Pemuda 1928-1988*. Bandung: Penerbit ITB.

Djajanto Supra dan Anton J. Lake (ed.)

1972 *Seminar Bahasa Indonesia 1972*. Ende: Nusa Indah.

Harimurti Kridalaksana

1966 "Pembentukan istilah ilmiah dalam Bahasa Indonesia". Simposium Bahasa dan Sastra. Jakarta.

1967 "Towards a standardization of phonologic and morphologic borrowed elements in Bahasa Indonesia". Makalah pada International Conference on Modernization of Languages in Asia. Kuala Lumpur.

Harimurti Kridalaksana dan Djoko Kentjono (ed.)

1968 *Seminar Bahasa Indonesia 1968*. Ende: Nusa Indah.

Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan

1950 *Bentuk Istilah*. Jakarta.

Lembaga Bahasa Indonesia

1944 *Istilah Bahasa Indonesia*. Medan: Tokagansyu Seityo.

Lembaga Linguistik FSUI

1978 *Hasil-hasil Kongres Bahasa Indonesia Pertama dan Kongres Bahasa Indonesia Kedua*. Jakarta.

Lukman Ali (ed.)

1967 *Bahasa Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: GunungAgung.

Rujiati Mulyadi, S.W.

1975 "Lembaga Bahasa Nasional serta hasil pekerjaan Komisi Istilah khusus di bidang hukum", dalam *Bahasa dan Sastra* tahun I nomor 1:19-23.

Teeuw, A.

1961 *A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia*. Den Haag: Martinus Nijhoff.

Uhlenbeck, E. M.

1971 "Indonesia and Malaysia", dalam Sebeok (ed), *Current Trends in Linguistics 8. Linguistic in Oceania*:55—111.

4. KEMAJUAN PENYELIDIKAN TATA BAHASA DAN PEMBINAAN BAHASA

Pembinaan bahasa dapat diartikan sebagai usaha untuk mengukuhkan penggunaan bahasa di kalangan penutur yang telah menguasainya dengan memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan tentang bahasa itu, dan meningkatkan sikap positif terhadapnya. Konsep ini berbeda dari konsep pengembangan bahasa, yakni usaha untuk memperluas penggunaan bahasa di luar masyarakat bahasa yang bersangkutan melalui pengajaran bahasa, penerbitan, media massa, dan lain-lain.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang harus menyesuaikan diri dengan tantangan modernisasi akan tetap melibatkan kedua upaya tersebut. Di sini hanya akan dibahas konsep pertama yakni pembinaan bahasa, khususnya upaya peningkatannya agar Bahasa Indonesia sungguh-sungguh bermakna bagi penggunaannya.

Salah satu aspek yang penting di dalam pembinaan bahasa ialah kemajuan dalam penyelidikan bahasa sebagai bagian dari perkembangan teori linguistik umum, maupun teori linguistik Bahasa Indonesia.

Marilah kita tengok sejenak beberapa masalah teori tata bahasa yang pasti berkaitan dengan pembinaan bahasa.

Secara sederhana interaksi teori linguistik dengan Bahasa Indonesia dapat dijelaskan sebagai hubungan di antara data dan teori. Bahasa Indonesia merupakan data bagi penelitian bahasa; hasilnya dapat memperkaya pemahaman kita tentang

bahasa pada umumnya. Sementara itu teori bahasa dapat dimanfaatkan untuk mendalami liku-liku Bahasa Indonesia. Gambaran yang sederhana itu menutupi kenyataan bahwa Bahasa Indonesia, seperti halnya bahasa mana pun di dunia ini, begitu banyak liku-likunya dan begitu ruwet sistemnya, sehingga tidak ada satu teori pun yang dapat menggambarkannya dengan tuntas, dan tidak ada satu buku tata bahasa di dunia ini yang lengkap dan bisa memberikan kepuasan kepada penggunanya. Namun, harus dicatat bahwa manusia penggunanya tidak pernah menghadapi kesulitan dalam penggunaannya untuk pelbagai keperluan. Kesulitan bahasa yang bagaimana pun dapat diatasinya dengan mudah. Perhatikan saja pengimbuhan (afiksasi) Bahasa Indonesia. Sistem ini secara teoretis hingga kini mampu secara morfemis menandai adanya 89 bentuk imbuhan yang mewakili 274 kemungkinan makna, namun belum ada bukti bahwa penutur Melayu/Indonesia, termasuk pembelajar awal, menghadapi kesulitan dalam penggunaannya.

Gambaran tentang teori sintaksis tidak jauh berbeda. Bidang ilmu itu dewasa ini begitu banyak cabangnya dan makin banyak diperinci orang sampai terdapat aliran, gerakan, paradigma, dan tendensi yang tak terbilang jumlahnya, sehingga kalau orang akan mendeskripsikan suatu bahasa ia terpaksa menentukan pilihan, atau kalau tidak puas, paling-paling ia membuat sintesis atas beberapa di antaranya. Belum lagi berubahnya suatu teori dari waktu ke waktu, sebagaimana kita saksikan dengan teori generatif yang sangat mendominasi dunia linguistik abad ke-20. Pernah seorang calon doktor datang kepada penulis dan menyatakan akan membuat karya ilmiah tentang sintaksis dengan menggunakan teori transformasi yang mutakhir, yakni *government and binding theory*. Langsung saja penulis ingatkan bahwa teori itu dalam paradigma generatif tidak lagi mutakhir, karena Chomsky, pencetusnya, sudah mempunyai teori baru yang disebutnya *minimalist program*, dan bahwa istilah *government and binding* itu oleh Chomsky dikatakan salah, dan digantinya dengan istilah *principles and parameters*, dalam teori yang mutakhir itu pun istilah *transformasi* sudah dianggap tidak relevan lagi. Bukan hanya itu saja: penelitian sintaksis oleh Chomsky dianggap sudah selesai, yang harus dikerjakan sekarang dalam paradigma generatif ialah penelitian fonologi dan semantik (!).

Bila fakta itu dapat membuat seorang peneliti, apalagi pemula dalam linguistik, limbung, mestinya tidak demikian halnya dengan fakta pertama yang

saya utarakan di atas tadi. Keruwetan bahasa merupakan tantangan yang sangat mengasyikkan bagi setiap peneliti bahasa. Di sinilah kita dapat mengadu teori dengan data; dan dapat menguji seberapa jauh sebuah teori mampu menampilkan kesahihannya, dan kemudian menunjukkan kejituannya untuk menganalisis bahasa apa pun. Bila kita mengatakan jitu, yang kita maksud tidak lain seberapa jauh teori itu mampu memberikan pemahaman yang lebih cermat atas cara bekerjanya bahasa yang diteliti.

Paragraf terakhir itu merupakan latar belakang bagaimana pemahaman atas ciri ergatif dalam Bahasa Indonesia mengharuskan penilaian kembali atas liku-liku sistem kata kerjanya. Menurut tilikan penulis, karena Bahasa Indonesia mengandung ciri-ciri ergatif sintaktis dan semantis (bukan fonologis) yang tampak dari peri laku subyek berargumen dua, tentulah ergativitas itu muncul pula dalam kata kerja yang mengiringinya. Kata kerja dalam ayat seperti

Ibu kehilangan uang
atau
Atlet itu kehabisan napas

lazim disebut kata kerja pasif, padahal tidak ada padanan aktifnya. Ini berlainan dengan kata kerja *menghilangkan* dalam ayat

Adik menghilangkan kunci keretanya

dan kata kerja *menghabiskan* dalam

Kaum politisi itu menghabiskan uang rakyat

yang masing-masing dapat dipasifkan dengan *di-*. Itulah sebabnya klasifikasi kata kerja transitif (tentunya di samping kata-kata kerja lain) dalam Bahasa Indonesia itu harus ditinjau kembali dan menjadi:

- (1) kata kerja aktif,
- (2) kata kerja pasif,
- (3) kata kerja ergatif seperti kata kerja dengan konfiks *ke-an* di atas, dan
- (4) kata kerja antipasif, misalnya dalam ayat

*Anak-anak itu haus akan kasih sayangibu,
Pemuda seumur dia pasti benci kepada perempuan,*

dan

Anak-anak itu membaca buku (yang tidak dapat dipasifkan, dan yang berlainan dari *Anak-anak itu membaca buku Siti Nurbaya* yang aktif, yang dapat dipasifkan menjadi *Buku Siti Nurbaya dibaca anak*).

(Catatan: tentulah istilah kata kerja ergatif dapat dibaca sebagai kata kerja dengan subyek ergatif)

Di atas telah disinggung pengimbuhan Bahasa Indonesia yang cukup rumit tetapi tidak menimbulkan masalah bagi penutur. Hingga kini deskripsi tentang komponen itu biasanya hanya berupa daftar bentuk dan makna awalan, sisipan, akhiran, dan sebagainya, yang biasanya diberi contohnya. Pastilah merupakan kesalahan besar bila kita menyangka bahwa penutur bahasa menggunakan pelbagai imbuhan itu semata-mata dengan mengambil unsur-unsur itu dari daftar yang dimilikinya, tanpa mempertimbangkan keteraturannya walaupun secara tidak sadar. Bagaimana mungkin seorang penutur Bahasa Indonesia dapat menggunakan bentuk *berjuang*, misalnya, kemudian di tempat lain menggunakan bentuk *pejuang* atau *perjuangan*, dan secara konsisten menghindarkan bentuk **menjuang*, **penjuang*, dan **penjuangan*, kalau ia tidak memanfaatkan sistem pengimbuhan sekurang-kurangnya berupa proses dan urutan proses? Banyak gejala morfologis bahasa kita yang benar-benar menantang penjelasan yang serius. Gejala-gejala itu pasti tidak dapat dijelaskan hanya dengan memberi daftar imbuhan-imbuhan yang ada, seperti sekarang lazim digunakan dalam buku-buku tata bahasa, atau dengan menggunakan model penataan atau *item-and-arrangement*, model yang lazim dalam teori yang positivistis. Namun, bila kita akan menggunakan model proses atau *item and process* model, tentulah harus ada perincian dan pendalaman teoretis sebagai pertanggungjawaban. Penulis memang

mencoba menjawab persoalan itu dengan menggunakan proses dan urutan proses; jadi beberapa bentuk harus diperlakukan sebagai bentuk yang kemudian terjadi setelah terjadinya bentuk-bentuk lain: *pejuang dan perjuangan* terjadi setelah *berjuang*, dan bukan sebaliknya. Urutan semacam ini bukan hanya terjadi pada afiks-afiks itu, melainkan juga pada imbuhan-imbuhan lain, seperti *ajar—mengajar—pengajar—pengajaran*, dan *ajar—belajar—pelajar—pelajaran*. Ternyata kemudian bahwa pengakuan akan adanya urutan proses seperti itu tidak cukup. Harus juga kita pertimbangkan bagaimana tempat proses-proses itu dalam sistem bahasa secara keseluruhan, khususnya apa saja yang dialami oleh proses morfologis itu.

Selama ini lazim dipahami bahwa yang mengalami proses adalah morfem. Ini adalah konsekuensi penerapan model penataan yang sifatnya statis. Ternyata bila kita berpendirian demikian, terjadilah lingkaran yang tak jelas ujungnya. Maka sampailah penulis pada model yang menempatkan morfologi sebagai proses dengan leksem sebagai *input* dan kata sebagai *output*. Model itu cocok sekali dengan teori bahasa sebagai sistem yang memiliki tiga subsistem, yakni leksikon (yang satuan dasarnya leksem), tata bahasa (yang satuan dasarnya kata), dan fonologi (yang satuan dasarnya fonem). Morfologi adalah bagian dari subsistem tata bahasa yang mengubah leksem menjadi kata. Penggunaan *lexeme-based morphology* seperti itu mempunyai latar yang lebih mendalam teori linguistik yang digunakan bukan hanya bersifat holistik (yang demi usaha meringkaskan tulisan ini tidak dibahas lebih mendalam), melainkan juga merupakan upaya untuk menjelaskan bagaimana penutur Bahasa Indonesia membentuk kata dengan memanfaatkan pengimbuhan. Singkatnya, model teoretis itu adalah model kognitif.

Bukan hanya fakta-fakta morfologis yang menantang pemahaman atas bagaimana penutur menyiapkan dan menggunakan potensi bahasanya, melainkan juga fakta-fakta sintaktis. Karena fakta bahasa dalam Bahasa Indonesia menurut penulis teori linguistik yang fungsional yang harus digunakan dan sebagai penjabarannya digunakan teori tata bahasa fungsional. Karena banyaknya aliran dalam teori fungsional, harus dikembangkan semacam sintesis, sehingga ia menggunakan tiga konsep sebagai tiang pancang teorinya, yakni struktur, kategori, dan fungsi. Tiga jenis fungsi digunakan, yakni fungsi sintaktis, fungsi semantis,

dan fungsi pragmatis. Tidak perlu dibantah dan tidak perlu dirisaukan bahwa tidak ada orisinalitas dalam sintesis itu. Namun, justru perangkaian semua komponen itu menjadi teori yang padu dan komprehensif memperlihatkan orisinalitas yang dapat memberi sumbangan untuk memahami dan menggambarkan Bahasa Indonesia secara utuh.

Demikianlah sekilas beberapa butir teori tata bahasa yang mengharuskan kita untuk meninjau kembali wawasan kita atas tata bahasa Bahasa Indonesia yang selama ini dianut orang. Penyelidikan atas liku-liku bahasa demikian mendorong para ahli bahasa untuk menyajikannya kepada masyarakat umum, namun dapat dipastikan bahwa tidak semua orang akan bahagia dengan kerumitan-kerumitan baru semacam itu. Apa boleh buat, memang demikian kenyataannya: ia harus berbicara apa adanya sesuai dengan fakta yang ditemukannya. Jadi kalau dalam penelitiannya ternyata dalam Bahasa Indonesia ada 13 jenis kata, ia harus menjelaskannya kepada masyarakat; kalau dalam penelitiannya ia mampu membuktikan bahwa kata-kata seperti *ya*, *assalam alaikum*, *selamat pagi* jenisnya tidak sama dengan kata-kata seperti *aduh*, *astaga*, *amboi*, ia harus dengan jujur mengutarakannya kalau menurut penelitiannya pengimbuhan Bahasa Indonesia harus diperikan berdasarkan model proses dengan menjelaskan hubungan bentuk seperti *hitung—menghitung—penghitungan* yang berbeda dari *hitung—berhitung—perhitungan*, ia tidak boleh menutup-nutupinya. Semua itu adalah fakta Bahasa Indonesia milik orang Melayu. Jadi, janganlah orang Melayu menafikan hakekat bahasanya sendiri, sebab ahli bahasa secara etis tidak boleh menyebarkan kesesatan dalam perjumpaannya dengan khalayak ramai.

Untuk tidak menafikan hakekat Bahasa Indonesia penutur mesti menghargai kemajuan ilmu, khususnya ilmu tata bahasa, karena kemajuan dalam ilmu apa pun tidak dapat dibendung; kedua, liku-liku bahasa yang makin nyata sebagai hasil pengamatan yang makin teliti mesti dipandang sebagai kekayaan Bahasa Indonesia dan kekayaan budaya Melayu sebagaimana tercermin dalam bahasa, dan jangan dipandang sebagai keruwetan bahasa yang hanya merepotkan penutur. Memang dengan memahami liku-liku bahasa itu tidak dijamin penutur atau pembelajar akan lebih fasih ber-Bahasa Indonesia. Bukan itu tujuan penyelidikan tata Bahasa Indonesia, dan bukan itu pula tujuan pembinaan Bahasa Indonesia. Dengan memahami kekayaan bahasa diharapkan orang mampu memanfaatkan

potensi bahasa agar dapat digunakan secara lebih kreatif. Dengan pembinaan bahasa diharapkan orang akan lebih arif dan cerdas.

Catatan bibliografis

1. Buku Chomsky yang mengedepankan teori mutakhirnya ialah *Minimalist Program*, Cambridge 1996: MIT Press. Buku pegangan yang memperlihatkan kekayaan teori sintaksis dewasa ini dan penggarapan atas pelbagai fenomena sintaksis adalah karya Joachim Jakob et al., *Handbucher zur Sprach und Kommunikationswissenschaft Band 9: Syntax, ein Internationales Handbuch zeitgenossischer Forchung*, Berlin 1993: Walter de Gruyter, dan karya Keith Brown dan Jim Miller, *Concise Encyclopedia of Syntactic Theories*, London 1996 Pergamon. Buku yang dapat dirujuk untuk mengamati perkembangan baru dalam sintaksis dan linguistik pada umumnya ialah karya Mark Aronoff dan Janie Rees-Miller, *The Handbook of Linguistics*, Oxford 2001: Blackwell.
2. Teori penulis tentang morfologi itu secara terperinci diterapkan dalam bukunya *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta 1996: Gramedia, sedangkan tulisannya yang memperlihatkan usaha untuk membuat sintesis itu adalah "Sintaksis Fungsional: Sebuah Sintesis" (1993). Sebuah buku kecil berjudul *Struktur, Kategori, dan Fungsi dalam Teori Sintaksis* telah diterbitkan Unika Atma Jaya pada tahun 2002.
3. Salah sebuah buku yang membahas teori tentang perencanaan bahasa dalam mental penutur ialah karya Willem M.C. Level, *Speaking: from Intention to Articulation*, Cambridge, Mass 1995: MIT Press.

5. KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA: FUNGSIONYA DALAM PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

Ketika beberapa waktu yang lalu gagasan Kamus Besar Bahasa Indonesia dilontarkan ke tengah masyarakat, reaksi yang pertama keluar ialah, “O ya, kita tidak punya kamus semacam itu; padahal orang Belanda punya Van Dale, orang Amerika punya Webster, orang Inggris punya Oxford, dan orang Prancis punya Larousse!” Reaksi spontan itu menginsafkan orang bahwa sekalipun kita mempunyai bahasa nasional yang selalu kita bangga-banggakan, namun ternyata banyak bidang pembinaan bahasa yang kita lupakan selama ini.

Gagasan Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa kita untuk memikirkan dan meninjau berapa jauh kemampuan kita untuk menyusunnya dan apa fungsi kamus itu dalam usaha kita memantapkan dan menyebarluaskan Bahasa Indonesia.

Kamus dalam Pembinaan Bahasa

Walaupun bahasa-bahasa dunia pada umumnya mempunyai kamus besar atau kamus standar, tidak dengan sendirinya Bahasa Indonesia harus juga mempunyai kamus semacam itu kalau tidak ada fungsinya, dan tidak dengan sendirinya kita mesti berpayah-payah menyusunnya kalau kita tidak memahami fungsinya.

Usaha pembinaan bahasa tidak lain daripada usaha untuk menstabilkan bahasa agar tetap berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif. Seperti halnya

masyarakat yang memakainya, bahasa yang hidup selalu berubah sesuai dengan keperluan pemakaiannya. Pembinaan bahasa pasti tidak akan membawa hasil bila ditujukan untuk mencegah perubahan-perubahan yang dialami bahasa. Pembinaan bahasa dilakukan untuk menjaga agar bahasa dalam keadaan yang hidup itu tetap dapat dipakai sebagai alat komunikasi sosial.

Penyusunan kamus merupakan usaha kodifikasi bahasa yang menjadi bagian dari standardisasi bahasa atau pembinaan bahasa atau pembinaan bahasa tersebut. Dan kamus standar adalah catatan kekayaan suatu bahasa sampai pada waktu tertentu, yang disusun dalam bentuk daftar kata, lengkap dengan segala nuansa maknanya. Nuansa makna kata-kata tidak hanya diuraikan dalam bentuk defmisi, deskripsi, contoh, sinonim, atau paraf'rase, tetapi juga dengan label pemakaian (misalnya: dengan menyebutkan dalam bidang kehidupan apa sesuatu kata dipakai (label ragam bahasa); di daerah mana atau oleh kelompok sosial mana sesuatu kata dipakai dan dengan makna apa (label dialek regional atau dialek sosial); atau apakah sesuatu kata masih dipakai atau tidak; kalau tidak di mana pernah dipakai (label dialek temporal); dan dengan etimologi, yang menjelaskan perkembangan bentuk dan makna kata sejak permulaan kata itu dipakai dalam bahasa - entah kata itu kata asli, entah kata itu diambil dan bahasa lain. ¹⁾

Besarnya kamus standar tidak diukur dari jumlah kata yang terdapat di dalamnya, melainkan dari luasnya bidang yang dijangkau oleh kamus itu. Makin luas jangkauan suatu kamus, makin banyak jumlah kata, makna kata, dan nuansa makna yang termuat.

Kamus yang berfungsi sebagai kamus sumber itu juga merupakan catatan tentang kekayaan budaya suatu bangsa pada waktu kini maupun pada waktu lampau; dengan sendirinya kamus itu juga merupakan kebanggaan bangsa yang memilikinya.

Kamus dengan ciri-ciri tersebut merupakan hasil penelitian dan pencatatan selama berpuluh-puluh tahun; dan karena bahasa yang hidup selalu berubah dalam hal tumbuh atau hilangnya kata, makna kata atau nuansa makna kata, maka

1) Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa etimologi dalam kamus standar berfungsi membantu menjelaskan makna dan nuansa makna secara historis. Fungsi pembantu ini tidak terdapat dalam kamus etimologi, yang mendaftarkan dan menjelaskan perkembangan bentuk dan makna kata demi perkembangan bentuk dan makna kata itu sendiri, antara lain untuk lebih memahami perkembangan kebudayaan.

kamus itu harus direvisi pada waktu-waktu tertentu, misalnya sekali dalam 10 tahun. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pekerjaan perkamusian bukanlah pekerjaan insidental, melainkan kegiatan rutin yang tetap berjalan selama bahasa masih hidup.

Kamus standar dengan ciri-ciri tersebut di atas menjadi dasar dari kamus-kamus lain yang lebih terbatas penggunaannya, seperti kamus sekolah, kamus umum, kamus sinonim-antonim, kamus ringkas. Dengan perkataan lain, adanya kamus standar memungkinkan penyusunan kamus jenis lain dengan cara yang lebih tepat dan lebih pasti — artinya lebih mudah—, karena kamus standar disusun atas dasar penelitian mumi.

Kamus standar biasanya bersifat monolingual, artinya kata-kata sesuatu bahasa diterangkan dalam bahasa itu sendiri. Atas dasar kamus standar biasa pula/disusun kamus bilingual atau kamus dwibahasa. Kamus bilingual tidak mempergunakan definisi untuk menjelaskan kata-kata, melainkan mempergunakan padan kata dalam bahasa lain.

Kamus standar yang demikian luas jangkauannya dengan sendirinya bersifat deskriptif. Kamus-kamus lain yang lebih sempit jangkauan dan kegunaannya yang disusun daripadanya dapat saja bersifat normatif.

Dua jenis buku referensi yang berbeda dari kamus tersebut di atas perlu disebut di sini, yaitu kamus ensiklopedis dan tesaurus. Kamus ensiklopedis berbeda sedikit dari kamus-kamus tersebut di atas dalam hal memuat nama orang, nama geografis, judul-judul karya seni, ilmiah, sastra dan lain-lain, di samping kata-kata; kecuali itu dalam menerangkan kata-kata bukan hanya dipakai definisi, melainkan juga keterangan yang terperinci tentang cara membuat, asal-muasal, gambar benda yang diterangkan dan sebagainya. Pendek kata, kamus ensiklopedis adalah campuran kamus dengan ensiklopedia.²⁾

Tesaurus berbeda dari kamus dalam hal tidak memuat kata-kata secara alfabetis: kata-kata disusun atas dasar pengelompokan hiponim, sinonim, atau antonim. Jadi, kata-kata yang berhiponimi (yang maknanya saling bertindihan) dikelompokkan dengan superordinatnya sebagai judul, atau kata-kata yang

2) Haruskah kamus standar bersifat ensiklopedis? Dalam hal ini tidak ada pendirian yang pasti, melainkan terserah kepada keperluan, tuntutan dan kemampuan masyarakat.

bersinonimi dikelompokkan dengan salah satu anggota sinonim itu sebagai judul, atau kata-kata yang berlawanan maknanya dikelompokkan dengan salah satu di antaranya sebagai judul. Tesaurus sifatnya monolingual dan tidak mengandung definisi.³⁾

Apakah penyusunan kamus standar harus mendahului pembuatan kamus-kamus yang terbatas kegunaannya? Keharusan tidak ada: ada usaha pembuatan kamus standar lepas dari usaha pembuatan kamus-kamus jenis terbatas, ada pula kamus standar yang disusun setelah kamus-kamus yang lebih kecil. Sekalipun demikian sesungguhnya keperluan untuk berbuat secara berurutan itu ada di Indonesia. Dengan kerja sama dari ahli-ahli pelbagai bidang akan tersusun kamus standar yang mencakup sebanyak mungkin aspek makna kata dan nuansa makna yang mewakili pelbagai bidang kehidupan, karena kamus standar merupakan hasil penyelidikan kehidupan. Karena kamus standar merupakan hasil penyelidikan yang sangat mendalam selama bertahun-tahun, maka kamus standar itu mengandung ketuntasan, ketelitian, kepastian, dan kemantapan yang tidak terdapat pada kamus-kamus yang lebih kecil formatnya. Terbaikannya pembinaan bahasa beberapa waktu yang lalu menjadi sebab mengapa Indonesia tidak mempunyai ahli leksikografi profesional yang dapat seorang diri menyusun kamus standar dengan syarat-syarat tersebut di atas. Tradisi leksikologi dan leksikografi belum terbina sampai sekarang; kamus-kamus terbit pada umumnya hasil pengisi waktu dan hobi penyusunnya; kamus-kamus itu lebih banyak berisi perkiraan dan intuisi penyusunnya daripada hasil penelitian yang mendalam (dengan beberapa kekecualian, tentu saja). Oleh sebab itu, demi efisiensi tenaga, waktu, dan dana sebaiknya semua ahli leksikografi dikerahkan untuk menyusun kamus standar; dan sesudah itu barulah potensi-potensi itu disebar untuk tugas-tugas yang terbatas itu.

Ciri lain yang juga menandai kamus standar ialah penelitian yang mendasari penyusunannya. Nilai kamus standar tidak terletak pada jumlah kata dan pada cetakan buku yang indah, melainkan pada dokumentasi tentang seluruh latar belakang apa yang dimuat di dalamnya, antara lain tentang di rna konteks

3) Ada tesaurus berbentuk kamus: judul-judul tadi disusun secara alfabetis sebagaimana kata kepala dalam kamus.

apa suatu kata dipakai, bilamana pertama kali dipakai, bagaimana perkembangan makna dan nuansa makna dan sebagainya. Pendek kata, karya leksikografis yang bermutu semata-mata ditentukan oleh penelitian leksikologis yang bermutu.

Tradisi Perkamusan di Indonesia

Sebagai bangsa yang muda dengan bahasa nasional yang muda pula sebenarnya kita tak perlu terlalu malu bahwa kita belum mempunyai kamus standar sebagaimana dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang sudah maju.

Pembinaan perkamusan merupakan proses yang panjang, setiap tahap dalam proses itu merupakan kumulasi dari penelitian dan analisis bahasa serta kegunaan praktis kamus hasil proses sebelumnya. Setiap penerbitan kamus diarahkan kepada kecermatan pencatatan bahasa dan kesempumaan yang setinggi-tingginya, walaupun setiap terbitan tidak dapat dilepaskan dari “ideologi bahasa” editor masing-masing dan kadang-kadang juga dari usaha editor untuk menyesuaikan terbitannya dengan selera publik. Di bawah ini kami berikan beberapa contoh, sebelum melihat dunia perkamusan di Indonesia.

Samuel Johnson, bapak leksikografi Inggris, penyusun *Dictionary of the English Language* (1755), menyatakan bahwa fungsi kamus ialah memelihara kemurnian bahasa. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Noah Webster, bapak leksikografi Amerika, penyusun *An American Dictionary of the English Language* (1828)—kamus yang menurunkan beberapa generasi kamus yang memakai nama Webster di Amerika.

“Ideologi bahasa” yang normatif itu bertentangan dengan pendirian yang melandasi kamus-kamus modern seperti *A New English Dictionary on Historical Principles* (1934)—yang lebih terkenal sebagai Kamus *Oxford*- dan *Webster's Third New International Dictionary* (1961) yang berusaha mencatat dan menafsirkan pemakaian bahasa secara cermat, tanpa mendikte mana yang betul dan mana yang salah.

4) Daftar kata multi- atau bilingual itu mula-mula mempunyai fungsi leksikografis. Dengan munculnya kamus hilanglah fungsi itu. Sekarang daftar kata hanya dianggap sebagai data pertama bahasa, yang diperoleh dengan mempergunakan blangko, seperti Daftar Holle atau Daftar Swadesh.

Tradisi perkamusan negeri-negeri yang sudah maju itu memang dimulai dengan kamus standar dan kamus monolingual; dari kamus sumber itu diterbitkan kamus-kamus yang lebih terbatas seperti *Shorter Oxford Dictionary*, *Webster's New Collegiate Dictionary*, *Van Dale Handswoordenboek* (dari *Van Dale Grootwoordenboek der Nederlandse Toel*), *Petit Larousse* (berdasarkan Grand Larousse); dan berdasarkan kamus-kamus standar itu sering disusun orang kamus-kamus bilingual.

Keadaan perkamusan di Indonesia tidak seperti itu. Sejarah leksikografi dimulai dari daftar-daftar kata atau glosarium ke kamus-kamus bilingual meningkat kemudian ke kamus-kamus monolingual. Menurut Catatan, karya leksikografi tertua dalam sejarah studi bahasa di Indonesia ialah daftar kata Cina-Melayu berasal dari permulaan abad ke-15, yang berisi 500 kata kepala. Daftar kata Melayu-Itali yang disusun Pigafetta (1522) termasuk pula karya leksikografis yang awal, sedangkan kamus tertua dalam sejarah bahasa-bahasa Indonesia ialah *Spraecck ende woord-boeck, Inde Maleysche ende Madagaskarsche Talen met vele Arabische ende Turcsche woorden* (1603) karangan Frederick de Houtman, dan *Vocabularium ofte Woortboeck naer ordre vanden Alphabet in 't Duytsch-Maleysche ende Malaysch-Duytsch* (1623) karangan Caspai Wiltens dan Sebastianus Danckaerts. Kamus-kamus Melayu itu jelas lebih tua dari *Lexicon Javanum* (1706), anonim, yang naskahnya tersimpan di Perpustakaan Vatikan, yang dianggap sebagai kamus Jawa tertua, dan pasti jauh lebih tua daripada kamus Sunda tertua yakni *Nederduitsch-Maleisch en Soendasch Woordenboek* (1841) oleh A. de Wilde.

Daftar-daftar kata dan kamus-kamus pelopor yang multi atau bilingual itu kemudian diikuti oleh pelbagai daftar kata dan kamus lain yang bermacam-macam formatnya.⁴⁾

Minat pada bahasa dan perkamusan pada jaman kolonial itu terbatas pada orang-orang asing saja, jadi kamus yang disusun pun pada umumnya kamus bahasa asing-Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia-asing. (Yang dimaksud dengan Bahasa Indonesia ialah Bahasa Indonesia, Jawa, Bali, Sunda, Makasar, dan lain-lain — bukan Bahasa Indonesia!) Satu-satunya kekecualian yang harus dicatat di sini ialah kamus Melayu-Jawa berjudul *Baoesastra Melayu-Djawa* (1916) karangan R. Sasrasoeganda, kamus bilingual pertama yang disusun oleh putra Indonesia.

Kamus monolingual pertama yang disusun oleh putra Indonesia ialah *Kitab Pengetahuan Bahasa* yaitu *Kamus Loghat Melayu Johor-Pahang-Riau-Lingga* penggal yang pertama oleh Raja Ali Haji dari Riau. Tahun 1354 Hijrah (=1928 Masehi) tercatat pada buku yang dicetak oleh Al Ahmadiyah Press Singapura. Karena Raja Ali Haji hidup pada pertengahan pertama abad ke-19, kita dapat memastikan bahwa buku tersebut sudah beredar — sekurang-kurangnya sudah berbentuk naskah — dalam abad ke-19, seperti halnya buku pelajaran ejaan dan tata bahasanya, *Bustanulkitabina* (dicetak tahun 1273 H atau 1857 M). Dipandang dari teknik leksikografi sekarang, *Kitab Pengetahuan Bahasa I* itu tidak dapat disebut kamus murni, melainkan boleh dianggap sebagai kamus ensiklopedis untuk pelajaran.

Pada masa kemudian *Baoesastra Djawa* (1930) karangan W.J.S. Poerwadarminta, C.S. Hardjasoedarma, dan J.C. Poedjasoedira dapat dianggap sebagai pelopor perkamusan monolingual Bahasa Jawa, seperti halnya *Kamoes Basa Soenda* (1948) karangan R. Satjadibrata bagi Bahasa Sunda.

Ada beberapa kamus monolingual Bahasa Indonesia yang terbit; yang paling utarna di antaranya tentu saja *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1957) karangan W.J.S. Poerwadarminta.

Kamus itu disusun atas dasar bahan-bahan yang otentik, cukup berdokumentasi, tidak mengandung unsur-unsur preskriptivisme dan subyektivisme. Istilah-istilah teknis yang terbatas penggunaannya tidak dimuat di dalamnya, oleh karena itu kamus itu disebut kamus umum. Karena mutunya yang tinggi dipandang dari sudut leksikografi, tampaknya semua pekerjaan perkamusan Bahasa Indonesia pada masa-masa yang akan datang harus mempergunakan kamus itu sebagai landasan. Namun, perbaikan terhadap kamus itu merupakan pekerjaan yang amat mendesak, bukan hanya karena sudah tidak menjaman, tetapi juga karena cetakan ke-4 (1966) penuh salah cetak yang sangat menyesatkan pemakainya. Perlu dicatat bahwa Kamus Umum atau Kamus Poerwadarminta itu bukan kamus standar dan bukan kamus sumber.

Beberapa Hambatan dalam Penyusunan Kamus Standar

Sebagaimana dinyatakan di atas, penyusunan kamus standar bukanlah pekerjaan sambilan, melainkan pekerjaan rutin yang tak ada habis-habisnya; dan

pembuatan kamus standar menuntut penyelidikan yang amat teliti, cermat, dan makan waktu. Itu juga berarti menuntut tenaga ahli dan biaya tak sedikit.

Tentang tenaga: sekarang ini terasa sekali betapa kita kekurangan ahli-ahli Bahasa Indonesia yang benar-benar dapat diandalkan untuk melaksanakan proyek-proyek dasar dalam Bahasa Indonesia. Hal itu bukan hanya karena pengembangan Bahasa Indonesia ditelantarkan pada waktu-waktu yang lalu, tetapi juga karena lembaga-lembaga pendidikan bahasa selama ini tidak menyusun programnya atas keperluan akan pembinaan bahasa. Khususnya bidang perkamusan misalnya tak ada satu fakultas sastra pun yang mempunyai program pendidikan leksikologi dan leksikografi. Perkamusan diserahkan saja kepada *autodidakt* atau kepada orang-orang yang hobinya menyusun daftar kata dan menterjemahkan kamus-kamus asing—orang-orang yang tidak dipersiapkan untuk menjalankan penelitian dasar bagi penyusunan kamus.

Di samping itu biaya untuk penelitian bahasa dewasa ini demikian kecilnya sehingga pasti tidak memadai untuk menunjang sebuah kamus standar.

Mengingat beratnya dan luasnya jangkauan kegiatan perkamusan tampaknya penyusunan kamus standar mesti dilakukan oleh sebuah tim yang kuat dalam suatu badan yang permanen sifatnya.

Pada tahap perkembangan Bahasa Indonesia yang lebih bersifat rehabilitasi seperti dewasa ini kegiatan perkamusan yang dapat dilakukan ialah:

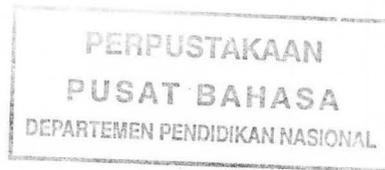
1. mengisi kekurangan tenaga ahli leksikografi dengan kursus dan latihan;
2. mengadakan penelitian yang akan menunjang kamus standar tentang hal:
 - a. perbendaharaan kata dalam semua variasi Bahasa Indonesia, baik dalam pelbagai dialek sosial dan regional, maupun dalam variasi-variasi khas yang mewakili pelbagai cabang kehidupan;
 - b. sejarah asal-usul kata (etimologi);
3. mengadakan sistem dokumentasi leksikologi.

Setelah itu barulah diadakan persiapan bagi penyusunan kamus standar.

Adalah keyakinan penulis, bahwa tanpa kegiatan-kegiatan dasar tersebut sebuah kamus besar Bahasa Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai kamus standar dan kamus sumber hanya akan berupa angan-angan belaka.

Catatan

- 1) Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa etimologi dalam kamus standar berfungsi membantu menjelaskan makna dan nuansa makna secara historis. Fungsi pembantu ini tidak terdapat dalam kamus etimologi, yang mendaftarkan dan menjelaskan perkembangan bentuk dan makna kata demi perkembangan bentuk dan makna kata itu sendiri, antara lain untuk lebih memahami perkembangan kebudayaan.
- 2) Haruskah kamus standar bersifat ensiklopedis? Dalam hal ini tidak ada pendirian yang pasti, melainkan terserah kepada keperluan, tuntutan dan kemampuan masyarakat.
- 3) Ada tesaurus berbentuk kamus: judul-judul tadi disusun secara alfabetis sebagaimana kata kepala dalam kamus.
- 4) Daftar kata multi- atau bilingual itu mula-mula mempunyai fungsi leksikografis. Dengan munculnya kamus hilanglah fungsi itu. Sekarang daftar kata hanya dianggap sebagai data pertama bahasa, yang diperoleh dengan mempergunakan blangko, seperti Daftar Holle atau Daftar Swadesh.



49

ISBN 978-979-99145-4-5



9 789799 991454